



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional maka Kabupaten Mukomuko memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah;
- e. bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan RPJPD dengan Peraturan Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mukomuko 2005-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005-2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berlaku tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Daerah I Tahun 2005-2010, RPJM Daerah II Tahun 2010-2015, RPJM Daerah III Tahun 2015-2020, RPJM Daerah IV Tahun 2020-2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wajib berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
11. Visi adalah cara pandang yang kuat ke masa depan yang merupakan gambaran keinginan yang akan dicapai;
12. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan Visi
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

15. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dicapai.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
BAB IV : Visi dan Misi Daerah
BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB VI : Kaidah Pelaksanaan
- (2) Uraian secara rinci RPJPD Kabupaten Bengkulu Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2005-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 12 APRIL 2013

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 12 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI, SP

PEMBINA Tk I IV/b

NIP. 195305081976031007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas yang multidimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan. Dalam rangka akselerasi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan diawali dengan disusunnya dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, kemudian diikuti penganggaran yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi, dan diterjemahkan dalam pelaksanaan pembangunan mengedepankan profesionalitas dengan diiringi pengawasan dan pengendalian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan menggunakan tiga prinsip dasar yakni efisien, eksternalitas dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi landasan dan kriteria bagi pelaksanaan pembagian fungsi utama Pemerintah. Dengan pemahaman masing-masing jenjang pemerintahan seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki kewenangan sekaligus peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keragaman kondisi masing-masing.

Implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah membutuhkan sejumlah perangkat pengaturan dalam memanfaatkan seluruh sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai daerah yang otonom mempunyai hak dan wewenang serta kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan sejumlah kewenangan mengupayakan dan mengelola sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seyogyanya pembagian kewenangan mengupayakan pengelolaan sumber-sumber keuangan tersebut proporsional atau seimbang dengan pengelolaan di dalam pelimpahan

kewenangannya. Namun keseimbangan tersebut umumnya tidak pernah langsung terwujud. Prosesnya dinamis dan senantiasa membutuhkan waktu pembelajaran yang cepat atau lambatnya tergantung komitmen semua pihak yang terkait.

Disparitas pembangunan pada masing-masing Kabupaten dan Kota yang menjadi semakin sulit dikoordinasikan, kemudian diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN tersebut diharapkan akan menjadi instrumen yang mampu mensinergikan seluruh pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap tingkatan pemerintahan dalam lingkup wilayah Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tersebut selanjutnya diikuti oleh terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang petunjuk penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. kemudian diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Mukomuko.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana Pemabngunan Jangka Panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah (provinsi, Kabupaten/Kota) untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan suatu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya. Pada dasarnya RPJPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025, tidak saja akan menjadi pedoman kerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Melainkan juga menjadi kerangka acuan bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan Pemerintah

Daerah bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya daerah selama kurun waktu yang sama.

Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan dalam fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah. Melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada level pemerintahan Provinsi Bengkulu serta akselerasi pemerintahan yang diamanatkan menurut semangat reformasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

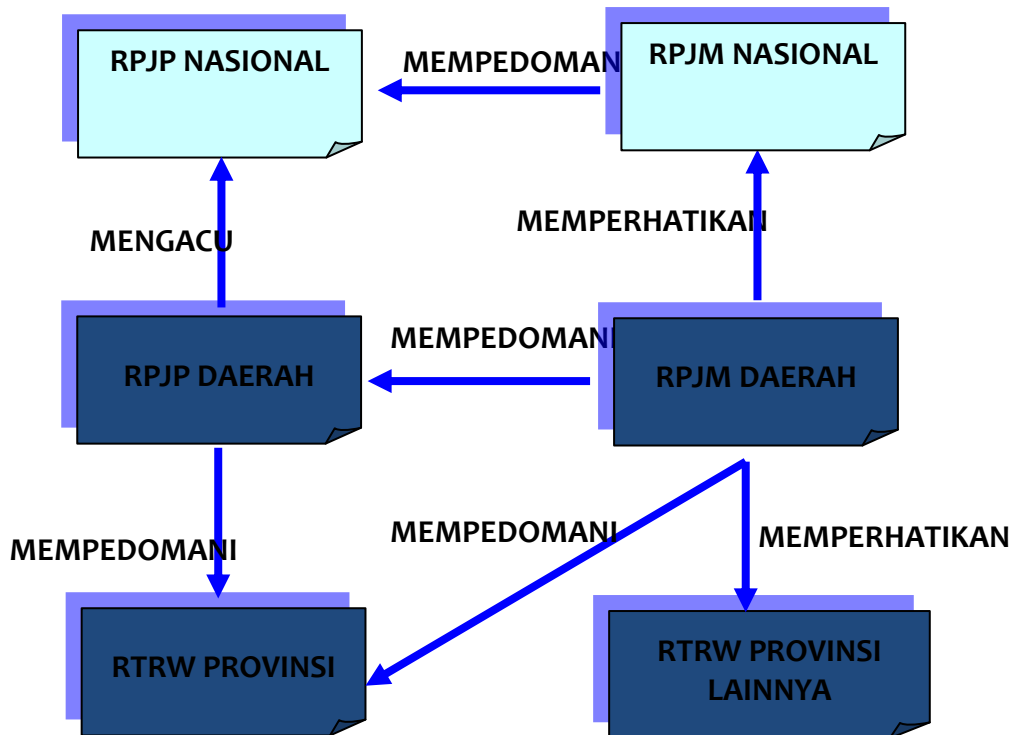
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032.

1.3 Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

1. Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko 2005-2025 mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kabupaten Mukomuko dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Mukomuko dan berfungsi sebagai arah serta pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. RPJP merupakan dasar dari penyusunan RPJM daerah Kabupaten Mukomuko. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka wajib menyusun RPJP untuk mencapai tujuan nasional dan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. RPJP Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. Disamping itu, penyusunan RPJP Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko.
4. RPJP Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, yang selanjutnya RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) di Kabupaten Mukomuko. Renstra-SKPD dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Disamping itu, RPJM Daerah setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah. RKP Daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan Renja-SKPD.

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJP, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJP dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJP serta maksud dan tujuan penyusunan RPJP.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kabupaten Mukomuko serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko yang meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau

mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasil pembangunan daerah.

BAB III. Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

Penyajian isu-isu strategis daerah meliputi permasalahan-permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan-permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan-permasalahan pembangunan dan permasalahan-permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis daerah dapat berasal dari permasalahan-permasalahan daerah maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJPD Kabupaten Mukomuko 2005-2025 beserta penjelasannya.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VI. Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa seluruh *stakeholder* pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan Arah Kebijakan dalam RPJP dengan sebaik-baiknya. RPJP juga merupakan pedoman untuk menyusun RPJMD.

1.5 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mukomuko sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dapat bersinergis, koordinatif dan berkelanjutan.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode 2005-2025 yang memuat rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan kondisi dan analisis kondisi umum daerah saat ini serta prediksinya kedepan sebagai instrumen pengintegrasian perencanaan Kabupaten Mukomuko dengan sistem perencanaan nasional serta menjamin perencanaan pembangunan agar efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan inspirasi para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengarahkan proses perubahan sosial masyarakat dalam rangka : a) meningkatnya kemampuan sosial-ekonomi masyarakat sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. b) meningkatnya kapasitas kelembagaan pembangunan melalui perubahan sosio-kultural yang mendukung.
3. Menyajikan gambaran kondisi umum daerah sekarang dalam konsistensi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

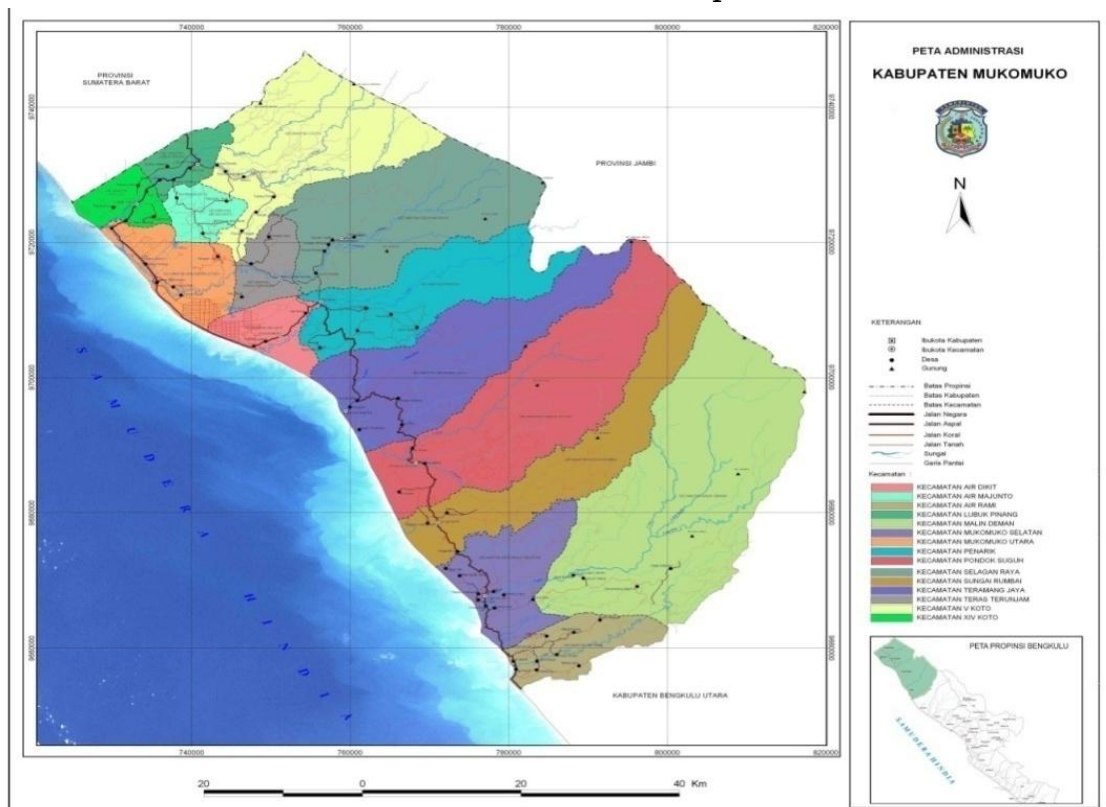
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Mukomuko terletak di sebelah paling utara Provinsi Bengkulu. Luas wilayah Kabupaten Mukomuko mencapai lebih kurang 403.670 hektar atau 4.036,7 kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Mukomuko memanjang dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai ke Kabupaten Bengkulu Utara dan jaraknya lebih kurang 200 kilometer.

Secara astronomis, Kabupaten Mukomuko terletak di antara 101001'15,1"- 101051'29,6" Bujur Timur dan 2016'32"- 3007'46" Lintang Selatan. Sementara jika ditinjau dari posisi geografisnya, Kabupaten Mukomuko di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Gambar II.1 Peta Administratif Kabupaten Mukomuko



Kabupaten Mukomuko berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 98,22 kilometer. Bagian timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Tabel II.1
Topografi Menurut Ketinggian Di Atas Permukaan Laut
Di Kabupaten Mukomuko

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	< 25	53.468,88	13,25
2	25-50	43.842,28	10,86
3	50-75	32.687,84	8,10
4	75-100	26.489,84	6,56
5	100-200	71.921,36	17,82
6	200-300	50.255,29	12,45
7	300-400	32.640,52	8,09
8	400-500	24.211,85	6,00
9	500-750	32.483,21	8,05
10	750-1000	17.681,25	4,38
11	1000-1250	8.461,10	2,10
12	1250-1500	5.534,70	1,37
13	1500-1750	2.546,88	0,63
14	1750-2000	1.123,71	0,28
15	> 2000	321,30	0,08
Jumlah		403.670,00	100.00

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko

Tabel II.2
Tinggi Wilayah Per Kecamatan Menurut Ketinggian
Di Atas Permukaan Laut Di Kabupaten Mukomuko

No	Ketinggian (mdpl)	Ketinggian (m)
1	Ipuh	21
2	Air Rami	20
3	Malin Deman	70
4	Pondok Suguh	50
5	Sungai Rumbai	31
6	Teramang Jaya	8
7	Teras Terunjam	20
8	Penarik	60
9	Selagan Raya	60
10	Kota Mukomko	5
11	Air Dikit	20
12	XIV Koto	9
13	Lubuk Pinang	14
14	Air Manjuntio	39
15	V Koto	30

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko

Dari tabel di atas terlihat bahwa Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Mukomuko adalah Kecamatan Malin Deman yakni 70 mdpl sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Kota Mukomuko yakni 5 mdpl.

Berdasarkan kelerengan yang ada di Kabupaten Mukomuko didominasi oleh kawasan yang mempunyai kelerengan antara 0-5% dengan luas 133.637 Ha diikuti kawasan yang mempunyai kelerengan antara 8-15% dengan luas 71.431,41 Ha selanjutnya diikuti oleh kelerengan antara 25-45% dengan luas 68.465,63. Sedangkan kelerengan yang paling kecil yaitu kelerengan 45% dengan luas 15.675,95 Ha. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3
Pembagian Wilayah Kabupaten Mukomuko Menurut Kelerengan

No	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-5	133.637,02	33,11
2	5-8	49.646,11	12,30
3	8-15	71.431,41	17,70
4	15-25	64.813,88	16,06
5	25-45	68.465,63	16,96
6	>45	15.675,96	3,88
Jumlah		403.670,00	100

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko

Tabel II.4
Jenis Tanah di Kabupaten Mukomuko

No	Jenis Tanah (Great Group)	Ordo	Luas (Ha)
1	Dystrandepts/Dystropepts/Humitropepts	Insepsol	2.719,09
2	Dystrandepts/Humitropepts	Insepsol/Ultisol	6.008,41
3	Dystrandepts/Haplohumults/Distrandepts	Insepsol/Ultisol	393,63
4	Dystrandepts/Haplohumults/Humitropepts	Insepsol/Ultisol	126.830,86
5	Dystrandepts/Haplohumults/Humitropepts/Eutropepts	Insepsol/Ultisol	30.397,47
6	Dystrandepts/Hapludults/Haplohumults	Insepsol/Ultisol	8.775,68
7	Dystrandepts/Hapludults/Haplohumults/Humitropepts	Insepsol/Ultisol	31.500,52
8	Dystrandepts/Hapludults/Haplohumults	Insepsol	15.760,29
9	Dystrandepts/Humitropepts	Insepsol	76.337,85
10	Dystrandepts/Humitropepts/Tropaquepts	Insepsol/Ultisol	3.306,76
11	Dystrandepts/Kanhaplohumults/Humitropepts	Ultisol/Insepsol	18.336,60
12	Haplohumults/Humitropepts/Eutropepts	Ultisol/Insepsol	3.223,32

No	Jenis Tanah (Great Group)	Ordo	Luas (Ha)
13	Hapludults/Dystropepts/Tropaque	Ultisol/Insepsol	15.594,0 5
14	Hapludults/Dystropepts/Tropaquepts/Humitropepts	Ultisol/Entisol/Insepsol	12.363,2 6
15	Hapludults/Tropopsamments/Hapludults	Entisol/Histosol	10.160,4 5
16	Hydraquents/Tropohemist	Insepsol/Entisol	1.668,31
17	Tropaquepts/Tropofluents/Eutropepts	Insepsol/Entisol	2.069,66
18	Tropaquepts/Eutropepts/Tropofluents	Entisol/Histosol	11.291,7 0
19	Tropaquepts/Troposaprists/Eutropepts	Histosol/Entisol	1.869,50
20	Tropohemist/Troposaprists/Hydraquents	Histosol/Entisol	14.068,6 2
21	Tropopsamments/Hydraquents/Psammaquents	Entisol	7.402,76
22	Tropopsamments/Psammaquents	Entisol	3.591,22

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko

Dari Tabel di atas terlihat bahwa tingkat klasifikasi *Great Group* asosiasi Dystropepts, Haplohumults dan Humitropepts mempunyai kawasan yang paling luas yakni 126.830,86 dari seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko, sedangkan asosiasi antara Dystropepts, Haplohumults dan Dystrandepsts menempati kawasan yang paling sempit yakni 393,63.

Tabel II.5
Tekstur Tanah Dominan di Kabupaten Mukomuko

Tekstur	Luas Tekstur Topsoil (Ha)	Luas Tekstur Subsoil (Ha)
Halus	293.926,85	177.678,39
Cukup Halus	71.766,44	154.690,32
Sedang	16.425,06	59.955,71
Cukup Kasar	392,18	392,18
Kasar	10.953,40	10.953,40
Jumlah	403.670	403.670

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko

Tekstur tanah di wilayah Kabupaten Mukomuko didominasi oleh tekstur tanah halus baik pada topsoil maupun pada subsoil seluas 177.678,39 Ha.

Tabel II.6
Kedalaman Efektif

Tekstur	LUAS	
	Ha	%
Ekstrim Dalam (>150 cm)	3.211,43	0,80
Sangat Dalam (101-150 cm)	273.030,64	67,64
Dalam (76-100)	118.128,80	29,26
Cukup Dangkal (<76 cm)	9.299,13	2,30
Jumlah	403.670	100

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko

Kedalaman efektif tanah yang dominan untuk masing-masing satuan lahan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kedalaman efektif tanah mineral dan kedalaman tanah gambut. Dari tabel di atas terlihat bahwa kedalaman efektif mineral didominasi oleh sangat dalam yakni kedalaman antara 101-150 cm yang mempunyai luas 273.030,64 Ha. Kedalaman efektif tanah pada tanah gambut di wilayah Kabupaten Mukomuko mempunyai kedalaman dengan kelas sangat dalam yakni 76-200 cm dengan kawasan seluas 14.016,70 Ha.

Tabel II.7
Sungai yang Mengalir Di Kabupaten Mukomuko

No	Nama Sungai Utama	Cabang Sungai
1	Air Manjuto	Air Manjuto, Air Pelokan, Air sekendak, Air Kiyang, Air Bahan, Air Sangkil, Air Jernih, Air Keruh
2	Air selagan	Air Badak, Air Bodi, Air Gading Gedang, Air Kepayang, Air Kepayang Kanan, Air Kepayang Kiri, Air Selagan Kanan, Air Selagan Kiri, Air Betung, Air Kapa, Air Hitam
3	Air Pelokan	Air Napar
4	Air Dikit	-
5	Air Pelatun Gedang	-
6	Air Bakal Kecil	-
7	Air	Air Bantal Kiri, Air Bantal Kanan, Air Kumbang
8	Air Berau	Air Jubak Panjang, Air Jernih, Air Sipat, Air Gajah Mati, Air Lupu, Air Basah, Air Sakir, Air Taramang, Air Berau Kanan, Air Berau Kiri
9	Air Hitam	-
10	Air Merusu	-

No	Nama Sungai Utama	Cabang Sungai
11	Air Retak	Air Bembam, Air Buluh, Air Madu, Air Puar
12	Air Dua	-
13	Air Pisang	-
14	Air Ipuh	Air Gelaga, Air Ijau, Air Simpang, Air Ikan, Air Sipal, Air Ipuh Panjang, Air Tengah, Air Penyukam
15	Air Buluh	Air Ombor, Air Hitam
16	Air Rami	-

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2004

Tabel II.8
DAS dan SUB DAS di Kabupaten Mukomuko

No	DAS	SUB DAS	Panjang sungai (KM)	LUAS (Ha)
1	Air Bantal	Bantal Kanan	251.053	19.573
2	Air Bantal	Bantal Kiri	127.205	13.379
3	Air Bantal	Bantal Hilir	77.261	6.379
4	Air Bantal	Bantal Gedang	54.370	4.490
5	Air Buluh	Buluh	179.219	12.272
6	Air Dikit	Dikit Tengah	110.022	12.061
7	Air Dikit	Dikit Hilir	65.908	10.669
8	Air Dikit	Pelokan	18.759	4.794
9	Air Ipuh	Ipuh Panjang	237.702	19.816
10	Air Ipuh	Ipuh Tengah	180.254	16.431
11	Air Ipuh	Ikan	141.795	11.015
12	Air Ipuh	Ipuh Hijau	197.787	14.611
13	Air Ipuh	Ipuh Hilir	192.889	14.475
14	Air Manjunto	Kiang	294.080	17.420
15	Air Manjunto	Manjunto Hulu	373.716	18.882
16	Air Manjunto	Manjunto Hilir	103.891	15.145
17	Air Manjunto	Pelokan	74.313	8.497
18	Air Rami	Rami Hulu	139.534	9.442
19	Air Rami	Rami Hilir	154.949	9.787
20	Air Retak	Retak Hulu	161.984	14.723
21	Air Retak	Air Hitam	64.769	9.166
22	Air Retak	Puar	46.638	5.175
23	Air Retak	Retak Hilir	34.785	4.265
24	Air Sabai	Sabai Hulu	54.058	47
25	Air Sabai	Sabai Hilir	117.408	49
26	Air Seblat	Seblat Hilir	299.778	291
27	Selagan	Selagan Hulu	281.644	15.159
28	Selagan	Gading Gedang	112.863	5.592
29	Selagan	Selagan Tengah	79.421	7.800
30	Selagan	Rengat	109.846	8.847
31	Selagan	Kepayang	106.332	9.327
32	Selagan	Hitam	37.035	6.125
33	Selagan	Selagan Hilir	81.232	11.116

No	DAS	SUB DAS	Panjang sungai (KM)	LUAS (Ha)
34	Selagan	Betung	45.395	5.835
35	Teramang	Teramang Hulu	240.478	22.453
36	Teramang	Berau	162.942	15.268
37	Teramang	Bengkok	101.128	14.128
38	Teramang	Teramang Kecil	24.515	3.279
39	Teramang	Lupu	67.541	6.417
40	Teramang	Oba	35.089	3.586
41	Teramang	Teramang Hilir	36.067	4.116

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Mukomuko 2004

Keadaan iklim Kabupaten Mukomuko umumnya seragam dengan curah hujan tinggi. Iklim di Kabupaten Mukomuko tidak dapat dipisahkan dengan iklim di wilayah Propinsi Bengkulu secara keseluruhan. Berdasarkan tipe iklim menurut kriteria Schmid dan Ferguson, Oldeman, dan menurut Koppen, maka tipe iklim di Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Schmidt dan Ferguson, Kabupaten Mukomuko mempunyai tipe iklim A (sangat basah)
- b. Menurut Oldeman, Kabupaten Mukomuko mempunyai tipe iklim B
- c. Menurut Koppen, Kabupaten Mukomuko mempunyai tipe iklim A dan B1

Musim yang terjadi di Kabupaten Mukomuko sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Desember-Maret) dan musim kemarau (Juni-September) sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan/pancaroba.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Pertanian Tanaman Pangan

Komoditi padi dan jagung merupakan komoditi unggulan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Mukomuko. Pada tahun 2008, Kabupaten Mukomuko telah swasembada beras. Komoditas padi menunjukkan peningkatan produksi dan produktivitas setiap tahunnya, peningkatan produksi padi di Kabupaten Mukomuko setiap tahunnya meningkat diatas 5% atau diatas rata-rata produksi nasional. Atas

keberhasilan tersebut, maka Kabupaten Mukomuko mendapat penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden R.I pada tahun 2008 dan 2009.

Dalam upaya penyediaan pangan masyarakat, dari tahun 2006-2011 Kabupaten Mukomuko telah berhasil meningkatkan luas panen dan produksi padi sawah dan jagung seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.9
Luas Panen serta Produksi Padi Sawah dan Jagung

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)						Produksi (ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Padi Sawah	9.53	13.8	12.9	15.10	8.70	10.16	39,14	57,82	58,54	75,99	37.9	55.89
		3	40	63	1	6	2	9	5	1	5	27	1
2	Jagung	4.33	8.82	8.87	8.925	5.11	5.028	26,02	43,58	43,59	53,55	29.4	23.18
		7	2	6		4		2	9	9	0	28	3

Sumber: Dinas Pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan, 2012 Data Diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi fluktuasi produksi pada tanaman padi sawah dan jagung dari tahun 2006-2011. Secara umum produksi tanaman pangan (padi/palawija) tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.10
Produksi Tanaman Pangan (Padi/Palawija)
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011

NO	KOMODITI	PRODUKSI (Ton)
1	Padi Sawah	55.891,80
2	Padi Ladang	5.936,50
3	Jagung	23.183
4	Kedelai	540
5	Ubi Kayu	4.702,11
6	Ubi Jalar	1.621,03
7	Kacang Tanah	343,27
8	KacangHijau	257,52

Sumber : Mukomuko dalam angka 2012, Bappeda

2.1.2.2 Perkebunan

Komoditi tanaman perkebunan terutama Kelapa Sawit dan Karet merupakan komoditi primadona di Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan data statistik perkebunan, Kabupaten Mukomuko memiliki Potensi Lahan tanaman Perkebunan seluas 113.532 Ha, dengan total produksi 1.251.324 Ton dengan produktivitas 20.070.9 Kg/Ha.

Tabel II.11
Potensi Perkebunan per Kecamatan (Ton)

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kako	lainnya
Ipuh	459.250	20.400	6.845	-	-	-	32.874
Air rami	1.600	10	6.000	1	-	2	16
Malin Deman	125	142	7.496	23	-	-	27
Pondok Suguh	168	-	9.739	-	-	-	-
Sungai Rumbai	240	-	3.057	-	-	-	-
Teramang Jaya	281	57	5.652	2	-	2	19
Penarik	625	36	1.045	-	-	-	-
Selagan Raya	88	-	1.209	-	-	-	59
Kota Mukomuko	4	-	7.350	-	-	-	-
Air Dikit	-	-	1.193	-	-	-	-
XIV Koto	-	36	7.583	-	-	10	20
Lubuk Pinang	420	-	6.822	-	-	-	-
Air Majunto	41	-	6.750	1.080	0,33	0,15	52
V Koto	883	-	4.075	-	-	1.000	-
Jumlah	463	20.681	79.972	1.106	0,33	1.014	33.067

Sumber : BPS 2012

2.1.2.3 Kehutanan

Adapun tujuan dari pembangunan di bidang kehutanan yakni untuk menciptakan keseimbangan dan kelestarian alam/lingkungan. Untuk itu melalui pembangunan bidang kehutanan diharapkan dapat meminimalisir tingkat kerusakan hutan karena Kabupaten Mukomuko mempunyai wilayah yang sebagian besar merupakan hutan.

Pembangunan di bidang kehutanan terlihat seperti tabel berikut ini.

Tabel II.12
Kegiatan Pembangunan Bidang Kehutanan Tahun 2006-2009

N O	KEGIATAN	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	Tahun 2011	JUMLA H
1	Rehabilitasi Daerah Sepadan											
	a. Sepadan Sungai	0	Ha	269	Ha	0	Ha	0	Ha	-	-	269 Ha
	b. Sepadan Pantai	25	Ha	36	Ha	0	Ha	0	Ha	-	-	61 Ha
	c. Sepadan Danau	0	Ha	20	Ha	0	Ha	0	Ha	-	-	20 Ha
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan / GERHAN	15	Ha	850	Ha	155	Ha	1	Ha	5	-	1035 Ha
3	Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan	0	btg	2.000	Btg	9.265	btg	0	btg	-	50.000 btg	61.265 Btg

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan tahun 2011

2.1.2.4 Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Mukomuko terdiri dari 2 jenis yaitu ternak rakyat dan ternak pemerintah. Data populasi ternak di Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.13
Populasi Ternak di Kabupaten Mukomuko Tahun 2009-2011

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK (EKOR)		
		2009	2010	2011
1	Sapi Potong	11.527	11,100	14.307
2	Kerbau	2.287	1.792	1.962
3	Babi	402	500	-
4	Kambing	13.312	10.881	10.822
5	Domba	105	22	105
6	Ayam Buras	136.222	338.962	196.222
7	Ayam Ras Pedaging	1.262	246.000	8.736

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan Kehutanan dan Peternakan, 2011

2.1.2.5 Perikanan

Kabupaten Mukomuko memiliki luas laut sekitar 727,60 Km² dan garis pantai sepanjang 98,22 Km. dengan kondisi tersebut sector perikanan merupakan potensi yang dapat dikembangkan lagi. Adapun data panjang garis pantai di Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.14
Panjang Garis Pantai dan Luas Kawasan Laut

NO	Kecamatan	Panjang Garis Pantai (Km)	Luas Kawasan Laut (Km ²)
1	Lubuk Pinang (Lubuk Pinang, V Koto dan Air Majunto)	0	Tidak Ada Pantai
2	Mukomuko Utara (Kota Mukomuko, XIV Koto dan Air Dikit)	40,23	298,40
3	Mukomuko Selatan (Ipuh, Air Rami dan Malin Deman)	23,61	174,90
4	Pondok Suguh (Pondok Suguh, Teramang Jaya, Sungai Rumbai)	34,33	254,30
5	Teras Terunjam (Teras Terunjam, Penarik dan Selagan Jaya)	0	Tidak Ada Pantai

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2012

Pantai barat Kabupaten Mukomuko memanjang dari arah barat laut (berbatasan dengan Povinsi Sumatera Barat) sampai arah tenggara (sebelah Air Rami) membentuk garis pantai yang relative lurus. Tipe pantai antara pasar Bantal sampai Air Buluh adalah curam, namun antara perbatasan sumatera Barat sampai pasar bantal tipe pantainya adalah sempit dan landai.

Aktivitas perikanan yang ada di Kabupaten Mukomuko terdiri dari perikanan Darat dan Perikanan Laut. Untuk jumlah Rumah Tangga Nelayan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.15
Jumlah Rumah Tangga Nelayan

NO	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Nelayan
1	Ipuh	306
2	Air Rami	112
3	Teramang Jaya	197
4	Kota Mukomuko	376
Jumlah		991

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Kota Mukomuko mempunyai jumlah Rumah tangga Nelayan terbanyak yakni 376 dan Kecamatan Air Rami yakni sebanyak 112.

Tabel II.16
Jumlah Pangkalan Pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan

NO	Uraian	Kecamatan/ Desa	Jumlah
1	TPI Talang Rio TPI Air Rami	Air Rami Talang Rio dan Air Rami	2
2	PPI Pulau Makmur	Ipuh Pulau makmur	1
3	PPI Pasar Bantal	Teramang Jaya Pasar bantal	1
4	TPI Koto Jaya	Kota Mukomuko Koto Jaya	1 Bangunan Rusak Berat sehingga tidak Beroperasi dengan baik.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2012

Dari tabel di atas terlihat adanya pangkalan pendaratan ikan di Kabupaten Mukomuko yang masih beroperasi, akan tetapi ada pangkalan pendaratan ikan yang dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik.

Tabel II.17
Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Mukomuko

NO	Kecamatan	Produksi (Ton)		
		2010	2011	2012
1	Ipuh	2.584,34	3.884,94	3.795,297
2	Air Rami	1.210,82	1.708,35	1.649,667
3	Teramang Jaya	2.406,21	8.369,09	12.026,591
4	Kota Mukomuko	1.039,68	2.537,60	3.672,597
Jumlah		7.241,04	16.499,98	21.144,152

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2012

Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Mukomuko setiap tahunnya meningkat. pada tahun 2010 sebanyak 7.241,04 Ton meningkat menjadi 21.144,152 Ton pada tahun 2012.

Tabel II.18
Jumlah Peralatan Perikanan Tangkap

NO	Kecamatan	Peralatan)		
		Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal
1	Ipuh	-	94	
2	Air Rami	-	55	
3	Teramang Jaya	14	-	149
4	Kota Mukomuko	-	109	9
Jumlah		14	258	158

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2012

Jumlah peralatan perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Mukomuko masing-masing 14 perahu tanpa motor, 258 perahu motor temple dan 158 kapal. Kematan yang mempunyai peralatan terbanyak adalah Kecamatan Kota Mukomuko.

Potensi sector perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko didukung oleh sumber air irigasi majunto, sehingga dalam perkembangan tahun ke depan agar dapat untuk dikembangkan lagi. Selain itu potensi lain adalah Danau Nibung dengan luas 40 Ha, danau lebar seluas 60 Ha. Potensi sector perikanan darat memiliki lahan seluas 2.185 Ha. Data potensi dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.19
Potensi Perikanan Budidaya

NO	Jenis Budidaya	Potensi	Pemanfaatan	Peluang
1	Karamba Jaring Apung	2000 unit	20 unit	1980 unit
2	Karamba Sangkar	5000 unit	-	5000 unit
3	Kolam	2185 Ha	394,56 Ha	179.044 Ha
4	Tambak	500 Ha	2,5 Ha	497,5 Ha
5	Rumput Laut	100 Ha	4 Ha	96 Ha

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2012

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berbagai tipe-tipe bencana yang terkait dengan Kabupaten Mukomuko adalah gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan kebakaran hutan. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko atas bencana yang akan terjadi, dan dalam upaya menjalankan mandat UU No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (PB), Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada tahun 2007 telah terjadi bencana alam yaitu gempa bumi dengan berkekuatan 7,9 skala richter yang berpusat di Lais. Kejadian ini membuat panik masyarakat dengan dikaitkan isu tsunami. Dari data ekspos Gubernur Provinsi Bengkulu kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2007 menyatakan bahwa jumlah kerusakan yang terjadi di Kabupaten Mukomuko adalah 95 rusak total untuk rumah ibadah, 208 rusak berat dan 44 rusak ringan untuk fasilitas pendidikan, 156 rusak berat untuk kantor pemerintah dan 55 rusak berat dan 1 rusak ringan untuk fasilitas kesehatan.

Adapun bentuk bencana lain yang mengancam Kabupaten Mukomuko adalah Abrasi Pantai. Bencana ini mengakibatkan terputusnya jalur transportasi darat jalan lintas Sumatra bagian barat, sehingga akses transportasi menjadi terganggu. Selain itu kebakaran lahan kerap terjadi di Kabupaten Mukomuko walaupun dalam skala kecil. Tapi dalam kenyataannya kebakaran ini mengakibatkan dampak terganggunya kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mitigasi bencana Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah berupaya dengan segenap usaha agar bencana dan segala akibat yang ditimbulkannya dapat dihindari. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni penyediaan *Early Warning System* (EWS), penyediaan Kendaraan Pemadam Kebakaran, pemetaan daerah rawan bencana, penyusunan rencana penanganan bencana dan pengarah, operasional siaga bencana, dan lainnya.

Untuk masa yang akan datang diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat agar dapat mengantisipasi dampak bencana baik pra bencana maupun pasca bencana.

2.1.4 Demografi

Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, yang diresmikan pada tanggal 23 Februari 2003 dengan Ibu kota Kabupaten

berkedudukan di Mukomuko. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, kecamatan di Kabupaten Mukomuko dari semula hanya 5 kecamatan, kini berkembang menjadi 15 kecamatan definitif, 152 desa dan 3 kelurahan.

Tabel II.20

Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Mukomuko

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa
1	Ipuh	198,11	4,91	16
2	Air Rami	964,60	23,90	12
3	Malin Deman	292,99	7,26	7
4	Pondok Suguh	219,98	5,45	11
5	Sungai Rumbai	511,30	12,67	9
6	Teramang Jaya	285,72	7,08	13
7	Teras Terunjam	144,36	3,58	8
8	Penarik	296,64	7,58	14
9	Selagan Raya	339,00	8,40	12
10	Kota Mukomuko	227,00	5,62	6 (+3Kelurahan)
11	Air Dikit	91,00	2,25	7
12	XIV Koto	77,00	1,91	8
13	Lubuk Pinang	92,71	2,30	7
14	Air Manjunto	127,29	3,15	8
15	V koto	169,00	4,19	10

Sumber Data : BPS Kabupaten Mukomuko 2011

Pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko dapat ditentukan jarak dari ibu kota Kabupaten. Adapun jarak ibu kota Kabupaten terhadap ibu kota Kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel II.21

Jarak Kecamatan ke Ibu kota Kabupaten

No.	Nama Kecamatan	Jarak (Km)
1	Kota Mukomuko	7
2	Ipuh	117
3	Teras Terunjam	52
4	Lubuk Pinang	30
5	Pondok Suguh	103
6	Malin Deman	139
7	Air Rami	128
8	Sungai Rumbai	109
9	Teramang Jaya	62
10	Penarik	42

No.	Nama Kecamatan	Jarak (Km)
11	Air Dikit	34
12	XIV Koto	18
13	V Koto	59
14	Air Manjuto	15
15	Selagan Raya	53

Sumber Data : BPS Kabupaten Mukomuko 2011

Jumlah Penduduk Kabupaten Mukomuko tahun 2011 adalah 158.164 jiwa. Dalam kurun waktu tahun 2003-2011, jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif. Hal ini berarti bahwa kepadatan penduduk semakin meningkat. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Mukomuko pada periode tahun 2003-2011 adalah 2,85. Jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko dalam 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.22
Jumlah Penduduk

TAHUN	JUMLAH
2003	125.208
2004	128.475
2005	131.821
2006	135.181
2007	138.590
2008	142.047
2009	145.530
2010	155.753
2011	158.164

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2011

Tabel II.23
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan
Pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mukomuko

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan per Km ²
1	Ipuh	16.556	2,69	83,57
2	Air Rami	10.394	1,82	10,78
3	Malin Deman	6.415	2,68	21,89
4	Pondok Suguh	11.204	4,00	50,93
5	Sungai Rumbai	6.707	2,19	13,12
6	Teramang Jaya	10.046	3,29	35,16
7	Teras Terunjam	6.995	4,22	48,46
8	Penarik	20.728	3,46	69,88
9	Selagan Raya	8.455	1,73	24,94
10	Kota	15.237	4,20	67,12

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan per Km ²
	Mukomuko			
11	Air Dikit	5.709	0,41	62,74
12	XIV Koto	10.858	1,22	141,01
13	Lubuk Pinang	12.739	3,65	137,41
14	Air Manjuntio	9.066	1,76	71,22
15	V koto	7.055	3,99	41,75
	Jumlah	158.164	2,85	39,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Jumlah penduduk di tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di atas. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Penarik dengan jumlah penduduk 20.728 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya adalah 2,69 persen. Sedangkan Kecamatan Air Dikit merupakan Kecamatan yang jumlah penduduknya sedikit yakni 5.709 Jiwa dengan laju pertumbuhan 0,41 persen. Begitu juga dengan tingkat kepadatan penduduk. Dari tabel terlihat bahwa Kecamatan XIV Koto adalah Kecamatan terpadat di Kabupaten Mukomuko dengan 141,01 jiwa per Km² dan Kecamatan Air Rami merupakan Kecamatan yang sangat jarang penduduknya dengan kepadatan 10,78 jiwa per Km². Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Mukomuko yakni 39,18 jiwa per Km².

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan

pembangunan ekonomi regional Kabupaten Mukomuko. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku dan berdasarkan atas dasar harga berlaku.

Tabel II.24
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	454.611,50	492.057,65	521.476,42	610.169,17	679.349,39
2	Pertambangan/penggalian	6.442,31	7.076,23	10.636,64	10.993,3	12.592,97
3	Industri Pengolahan	146.208,73	161.277,42	177.527,18	198.159,7	230.785,92
4	Listrik Gas dan Air Bersih	1.113,26	1.199,74	1.382,27	1.756,18	1.931,14
5	Bangunan	27.889,63	31.283,83	35.155,56	43.330,98	50.105,18
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	178.435,07	193.656,64	216.267,49	232.215,79	257.432,68
7	Pengangkutan dan Komunikasi	35.600,27	39.763,64	41.999,63	45.812,94	53.314,92
8	Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	102.943,2	115.747,23	127.779,8	147.857,37	177.974,11
9	Jasa-jasa	85.868,93	87.556,12	96.654,45	111.646,25	125.137,06

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2011

Penyajian PDRB Kabupaten Mukomuko atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. Penyajian seperti ini akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Mukomuko atas dasar harga konstan.

Tabel II.25
PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	215.676,76	226.190,4	238.449,92	243.290,46	251.391,58
2	Pertambangan/penggalian	3.251,28	3.498,22	3.878,13	4.323,34	4.349,21
3	Industri Pengolahan	62.482,46	67.624,62	71.492,74	77.462,39	84.718,06
4	Listrik Gas dan Air Bersih	546,1	577,95	657,59	761,95	762,8
5	Bangunan	13.270,1	14.561,21	15.539,72	16.857,49	17.774,17
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	84.254,74	86.699,24	90.904,16	95.403,91	100.440,7
7	Pengangkutan dan Komunikasi	17.890,75	18.419,31	19.275,8	20.688,7	22.611,31
8	Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	50.980,11	55.995,5	59.680,01	67.498,1	76.539,46
9	Jasa-jasa	39.755,46	41.114,84	43.507,72	48.267,46	51.484,47

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2011

Tabel II.26
Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rerata
Pertanian	51.85	51.72	43,75	43,56	42,44	43,52	42,76	45,65
Pertambangan dan Penggalian	6.06	6.10	0,62	0,63	0,87	0,78	0,79	2,26
Industri Pengolahan	6.30	6.32	14,07	14,28	14,45	14,13	14,53	12,01
Listrik, Gas dan Air Bersih	0.19	0.20	0,11	0,11	0,11	0,13	0,12	0,15
Bangunan	2.79	2.88	2,68	2,77	2,86	3,09	5,15	3,17
Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.41	19.40	17,17	17,14	17,60	16,56	16,20	17,64
Pengangkutan dan Komunikasi	3.93	3.94	3,43	3,52	3,42	3,27	3,36	3,55
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.42	3.37	9,91	10,25	10,40	10,55	11,20	8,44
Jasa-Jasa	6.05	6.07	8,26	7,75	7,87	7,96	7,88	7,41

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2011, Data diolah

2. PDRB per Kapita

Tabel II.27
PDRB Per Kapita

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
I	Atas Dasar harga Berlaku					
1	PDRB per Kapita	7.497.747,95	7.952.427,70	8.444.165,71	9.001.057,29	10.044.152,67
2	Pendapatan Regional per kapita	7.047.883,07	7.475.282,04	7.937.515,77	8.460.993,85	9.441.503,51
II	Atas dasar Harga Konstan					
1	PDRB per Kapita	458.821,3	483.800,42	510.782,64	540.080,57	573.467,45
2	Pendapatan Regional per kapita	3.521.955,16	3.623.316,92	3.733.840,36	3.688.877,91	3.857.209,96

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2011

pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat Rp.7.497.747,95 meningkat menjadi Rp.10.044.152,67. Sedangkan untuk harga konstan pada tahun 2007 tercatat Rp. 458.821,3 meningkat menjadi Rp. 573.467,45.

Tabel II.28
Daya Beli Masyarakat

No	Tahun	Daya Beli Masyarakat (Ribu)
1	2006	609,06
2	2007	615,67
3	2008	620,45
4	2009	622,56
5	2010	624,59
6	2011	627,72

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2011

Dengan adanya pemerataan perekonomian di Kabupaten Mukomuko mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan penduduk. Hal ini tercermin kepada penurunan jumlah angka kemiskinan yang ada di

Kabupaten Mukomuko. Angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.29
Angka Kemiskinan di Kabupaten Mukomuko

KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA				JUMLAH INDIVIDU			
	KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	TOTAL	KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	TOTAL
IPUH	258	259	344	861	1,310	1,147	1,390	3,847
AIR RAMI	262	180	180	622	1,303	729	644	2,676
MALIN								
DEMAN	245	162	164	571	1,243	686	664	2,593
PONDOK								
SUGUH	246	137	115	498	1,165	545	403	2,113
SUNGAI								
RUMBAI	185	124	161	470	841	499	594	1,934
TERAMANG								
JAYA	230	142	165	537	1,134	632	656	2,422
TERAS								
TERUNJAM	168	95	86	349	733	355	284	1,372
PENARIK	575	204	179	958	2,351	761	631	3,743
SELAGAN								
RAYA	533	157	93	783	2,468	603	341	3,412
KOTA								
MUKOMUKO								
O	160	136	141	437	855	636	516	2,007
AIR DIKIT	76	71	81	228	395	360	325	1,080
XIV KOTO	332	281	263	876	1,543	1,160	1,052	3,755
LUBUK								
PINANG	298	181	172	651	1,511	823	720	3,054
AIR								
MANJUNTO	277	206	193	676	1,136	805	664	2,605
V KOTO	215	176	174	565	1,074	850	774	2,698
TOTAL	4,060	2,511	2,511	9,082	19,062	10,591	9,658	39,311

SUMBER:
TNP2K

Perbaikan perekonomian juga berefek kepada pengurangan pengangguran di Mukomuko. Hal ini menunjukkan adanya lapangan kerja yang tersedia untuk meminimalisir angka pengangguran. Mengingat penduduk sebagai tenaga kerja yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan. Data pengangguran dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.30
Angka pengangguran di Kabupaten Mukomuko

URAIAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bekerja	61,486	61,788	61,587	68,637	78,915
Pengangguran	4,001	3,443	3,183	3,018	2,117
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65.8	69.49	66.84	68.87	76.33
Tingkat Pengangguran (%)	6.51	5.28	4.91	4.21	2,68

Sumber: Mukomuko dalam Angka 2012.

Tabel II.31
IPM Kabupaten Mukomuko

TAHUN	IPM
2006	68,56
2007	69,19
2008	69,62
2009	70,11
2010	70,55
2011	71,11

Sumber: Mukomuko dalam Angka 2012.

Untuk indeks pembangunan manusia di Kabuapten Mukomuko terus mengalami peningkatan. Dari table di atas terlihat bahwa pada tahun 2006 IPM Kabupaten Mukomuko sebesar 68,56. Sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 71,11. IPM ini menggambarkan bahwa semakin membaiknya pendidikan, pembangunan kesehatan dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Mukomuko.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial.

1. Pendidikan

Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel perkembangan Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) mengalami peningkatan dari 94,9 persen pada tahun 2007 menjadi 96,4 persen pada tahun 2010. Hal ini menggambarkan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia < 15 tahun yang telah terlayani pada jenjang pendidikan dasar.

Perkembangan kenaikan AMH penduduk penduduk usia < 15 tahun juga didukung melalui kegiatan pemberantasan buta aksara

melalui wadah kelompok belajar yang dibina melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan.

Tabel II.32
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
Pada Tingkat Pendidikan Dasar

Tingkat Pendidikan	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010	2011
SD/MI/ SDLB/ Paket A	APK(%)	88,36	96,69	98,07	102,16	109,68	113,7
	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	95,37	95,84	96,72	97,90	97,65	98,48
	Angka Putus Sekolah	0,42	0,38	0,26	0,14	0,31	0,1
	Angka Kelulusan	99,85	88,24	99,46	95,05	98,62	98,1
	Jumlah SD/SDLB	89	91	98	113	116	116+16
SMP/MTs/ Paket B	APK(%)	70,43	87,21	92,12	96,06	90,01	91,19
	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	62,56	67,21	78,28	80,39	75,72	72,5
	Angka Putus Sekolah	1,84	1,68	1,39	0,97	0,66	0,27
	Angka Kelulusan	97,40	91,19	32,23	54,13	97,79	93,04
	Jumlah SMP	26	29	32	34	37	37+15
SMA/SMK / MA/Paket C	APK(%)	56,38	49,15	72,24	78,74	53,47	49,96
	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	18,58	38,33	45,20	48,25	47,23	36,26
	Angka Putus Sekolah	0,68	0,48	0,42	0,37	1,51	0,15
	Angka Kelulusan	50,71	38,54	65,68	73,14	93,22	99,37
	Jumlah SMA	5	6	8	8	14	14+6+6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Untuk tingkat pendidikan Dasar terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2006 APK Kabupaten Mukomuko untuk SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 88,36 sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 113,7. Untuk APM SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2006 sebesar 95,37 meningkat pada tahun 2011 menjadi 98,48. Jumlah sarana dan prasarana gedung sekolah sampai saat ini berjumlah 116 unit SD dan 16 MI.

Untuk tingkat pendidikan Dasar (SMTP/MTS/Paket B) APK cenderung meningkat. Akan tetapi pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 6,05. Pada tahun 2006 APK SMTP/MTS/Paket B sebesar 70,43 meningkat menjadi 91,19 pada tahun 2011. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana gedung sekolah berjumlah 37 Unit SMP dan 15 unit MTs.

Untuk tingkat pendidikan Menengah terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar setiap tahunnya terjadi fluktuatif. Pada tahun 2006 APK Kabupaten Mukomuko untuk SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 56,38 sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 49,96. Untuk APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2006 sebesar 18,58 meningkat pada tahun 2011 menjadi 36,26. Jumlah sarana dan prasarana gedung sekolah sampai saat ini berjumlah 14 Unit SMA dan 6 SMK serta 6 MA.

Tabel II.33
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mukomuko

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Thn)
1	2008	7,07
2	2009	7,32
3	2010	7,41
4	2011	7,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Tabel II.34
Angka pendidikan yang ditamatkan

No	Tahun	Pandidikan yang ditamatkan (%)		
		SD	SLTP	SLTA
1	2009	61,98	20,02	14,26
2	2010	58,83	21,34	14,17
3	2011	56,1	23,32	15,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Jumlah masyarakat Kabupaten Mukomuko yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebanyak 56,1 persen dari jumlah penduduk total. Sedangkan jenjang SLTP sebanyak 23,22 persen dan 15,64 persen jenjang SLTA.

2. Kesehatan

Gambaran kondisi umum keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 yang merupakan keberhasilan pembangunan pada umumnya dapat di lihat dari beberapa indikator antara lain, Angka kematian Ibu (AKI), Angka kematian Bayi (AKB), Umur harapan Hidup (UHH), pencapaian UCI (*Universal Child Immunization*), Pencapaian global ATM (AIDS ,TB PARU, MALARIA) dan Prevalensi kasus gizi buruk.

Angka Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Mukomuko terus mengalami penurunan. sejak tahun 2003 sebesar 20,3/1000 Kelahiran Hidup menjadi 5,8/1000 Kelahiran Hidup di tahun 2011 ini. Secara umum Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mukomuko lebih rendah dari indikator MDGs sebesar 23/1000 Kelahiran hidup dan indikator Kementerian Kesehatan RI sebesar 34/1000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Mukomuko mulai tahun 2003 -2011 terus mengalami penurunan. Dari 83,2/100.000 Kelahiran Hidup menjadi 58,9/100.000 Kelahiran Hidup Angka ini masih jauh lebih rendah dari indikator yang di tetapkan oleh MDGs (*Millenium development Goals*) sebesar 102/100.000 Kelahiran Hidup, begitu juga dengan indikator Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Rebuplik Indonesia sebesar 228/100.000 Kelahiran Hidup.

Angka pencapaian imunisasi bayi secara Universal atau Universal child Immunization (UCI) yang merupakan salah satu cara untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2004 Universal Child Immunization (UCI) per desa hanya sebesar 30,4 persen dan tahun 2011 mencapai 88,1persen, sedangkan target Nasional, hanya sebesar 60 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) secara Nasional sebesar 70,2 tahun pada tahun 2006, dan di Kabupaten Mukomuko Usia Harapan Hidup (UHH) dari 68 tahun meningkat menjadi 72 tahun pada tahun 2011.

Global ATM (AIDS ,TB PARU, MALARIA) yang merupakan salah satu kesepakatan global dalam pembangunan kesehatan adalah salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan secara umumnya. Untuk Penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Mukomuko sampai saat ini belum dapat terdeteksi keberadaannya, hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan *scerening* penderita atau kelompok-kelompok resiko.

Untuk penyakit TB Paru, angka penemuan penderita pada tahun 2004 (*Case Detection Rate*) hanya sebesar 34 persen, pada tahun 2011 mencapai 101,6 persen angka ini, jauh di atas target Nasional sebesar 75 persen. Begitu juga dengan angka kesembuhan penderita, pada tahun 2004 hanya sebesar 58,5 persen pada tahun 2011 mencapai 94 persen, diatas target Nasional sebesar 85%. Untuk Penyakit malaria tingkat penemuan penderita atau *Annual Malaria Incident* (AMI) sebesar 33 persen penduduk pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 22 persen hal ini berarti penyakit malaria terus mengalami penurunan dari segi kuantitas, hal ini menggambarkan semakin baik dan meratanya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mukomuko.

Jumlah Kasus gizi buruk tahun 2009 sebesar 3 orang balita dengan prevalensi sebesar 0,043 persen, tahun 2010 sebanyak 4 orang balita dengan prevalensi 0,048 persen, 2011 sebanyak 13 orang balita dengan prevalensi 0,17 persen .Semua keberhasilan pembangunan kesehatan ini tidak terlepas dari dukungan dari semua stakeholder terkait terutama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Tabel II.35
Jumlah Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Mukomuko

No	Uraian	Jumlah
1	Posyandu per satuan balita	207
2	Puskesmas, per satuan penduduk	5
3	Puskesmas Non Perawatan	12
4	Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1
5	Poskesdes	50
6	Desa Siaga	151
7	Puskesmas Pembantu	53
8	Puskesmas Keliling	16

Sumber: BPS data diolah

Dari Data table di atas terlihat bahwa Ratio Puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Mukomuko adalah 0,032 persen, sedangkan ratio Posyandu per satuan balita adalah sebanyak 11,5.

c. Fokus Seni Budaya dan olah raga.

Tabel II.36
Jumlah Grup Kesenian dan Klub Olah Raga

No	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Jumlah Grup kesenian	35	42	53
2	Jumlah klub olah raga	82	90	127

Untuk seni Budaya diharapkan dapat berkembang terus untuk terciptanya kelestarian budaya daerah agar tidak punah. Pengenalan terhadap budaya daerah terutama pada kalangan muda akan sangat membantu untuk kelestarian budaya tersebut. Sedangkan untuk bidang keolahragaan diyakini bahwa olah raga sebagai pemersatu dengan semangat sportifitas yang dimilikinya yang nantinya akan mengharumkan nama daerah beserta prestasi yang dicapai.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Pendidikan

Tabel II.37
Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah	2009	2010	2011
7-12	99,71	99,63	98,04
13-15	82,83	86,18	86,79
16-18	41,02	50,33	60,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Dari table di atas dapat terlihat partisipasi sekolah dari berbagai tingkatan umur. Hal ini akan terus diupayakan untuk terus meningkat sehingga tidak ada lagi penduduk di Kabupaten Mukomuko tidak bisa baca tulis. Pembukaan akses pendidikan oleh pemerintah kabupaten yang didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan diharapkan dapat memperlancar upaya tersebut diatas.

Tabel II.38
Rasio Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak di Kabupaten Mukomuko

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru
2007	73	2.451	151	34	2	16
2008	78	3.444	240	44	3	14
2009	87	3.132	256	36	3	12
2010	90	3.248	371	36	4	9
2011	98	2.565	290	26	3	9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Tabel II. 39
Rasio Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Mukomuko Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru
Ipuh	9	1.965	105	218	12	19
Air Rami	11	1.637	111	149	10	15
Malin Deman	7	1.396	64	199	9	22
Pondok Suguh	5	1.039	74	208	15	14
Sungai Rumbai	6	920	87	153	15	11
Teramang Jaya	9	1.463	61	163	7	24

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru
Teras Terunjam	6	990	59	165	10	17
Penarik	14	2.912	156	208	11	19
Selagan Raya	8	1.087	72	136	9	15
Kota Mukomuko	11	1.862	173	169	16	11
Air Dikit	4	841	48	210	12	18
XIV Koto	7	1.471	94	210	13	16
Lubuk Pinang	7	1.835	104	262	15	18
Air Manjuntou	6	1.089	73	182	12	15
V koto	6	969	71	162	12	14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Tabel II. 40
Rasio Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mukomuko Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru
Ipuh	3	577	47	192	16	12
Air Rami	4	910	46	228	12	20
Malin Deman	3	164	30	55	10	5
Pondok Suguh	3	555	33	185	11	17
Sungai Rumbai	1	237	16	237	16	15
Teramang Jaya	4	325	50	81	13	7
Teras Terunjam	3	236	32	79	11	7
Penarik	4	669	52	167	13	13
Selagan Raya	2	407	25	204	13	16
Kota Mukomuko	2	792	52	396	26	15
Air Dikit	1	341	22	341	22	16
XIV Koto	2	692	46	346	23	15
Lubuk Pinang	2	557	46	279	23	12
Air Manjuntou	1	299	29	299	29	10
V koto	2	187	25	94	13	7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

Tabel II.41
Rasio Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Mukomuko Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru
Ipuh	1	591	42	591	42	14
Air Rami	1	202	24	202	24	8
Malin Deman	1	37	21	37	21	2
Pondok Suguh	1	337	23	337	23	15
Sungai	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru
Rumbai						
Teramang Jaya	-	-		-	-	-
Teras Terunjam	1	261	26	261	26	10
Penarik	2	83	32	42	16	3
Selagan Raya	1	29	10	29	10	3
Kota Mukomuko	2	933	68	467	34	14
Air Dikit	1	26	18	26	18	1
XIV Koto	-	-		-		-
Lubuk Pinang	1	392	31	392	31	13
Air Manjuntjo	1	351	27	351	27	13
V koto	1	20	19	20	19	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2011

2. Fokus Kesehatan

Tabel II. 42

Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis di Kabupaten Mukomuko

Unit kerja	Tenaga Medis				Tenaga Non Medis			Kesmas
	dokter	perawat	bidan	farmasi	Ahli gizi	Teknisi medis	sanitasi	
Puskesmas								
Ipuh	3	22	22	1	-	3	1	1
Air Rami	2	14	14	-	-	-	1	-
Malin Deman	-	7	8	-	-	-	-	1
Pondok Suguh	2	-	-	-	-	-	-	-
Sungai Rumbai	2	15	16	-	-	1	1	-
Teramang Jaya	3	10	11	-	-	-	-	1
Teras Terunjam	4	17	9	-	-	-	-	-
Penarik	4	24	16	-	1	-	-	-
Selagan Raya	1	14	8	-	1	-	-	2
Kota Mukomuko	3	23	12	1	-	-	-	3
Air Dikit	2	15	29	-	1	-	-	1
XIV Koto	3	23	13	-	-	-	-	3
Lubuk Pinang	3	19	14	1	-	-	-1	5
Air Manjuntjo	2	16	18	-	1	-	-	2
V koto	3	19	15	-	1	1	-	1
Jumlah	33	238	205	3	5	5	4	20
Dinkes	3	4	4	1	4	1	4	17
Rumah sakit	13	24	24	4	3	30	3	4
Jumlah	49	308	233	8	12	36	11	41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, 2011

Dari Data table di atas dapat dijelaskan bahwa ratio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Mukomuko adalah 0,31, sedangkan untuk

tenaga perawat per satuan penduduk yakni sebesar 1,95 dan Bidan per satuan penduduk adalah sebesar 1,47.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan Ekonomi Daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat Kabupaten Mukomuko. Aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi yang menghasilkan *out put*. Proses tersebut selanjutnya menghasilkan jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis terhadap pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah : konsumsi Rumah Tangga per kapita, persentase konsumsi rumah tangga non pangan, serta 9 sektor PDRB yaitu Pertanian, Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, Listrik, Gas dan air bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan restoran, Pengangkutan dan Transportasi, Keuangan dan Persewaan, dan Jasa-jasa.

Tabel II.43
Angka Konsumsi RT per Kapita

No	Total Pengeluaran RT (Rp)	Jumlah RT	Rasio
1	270.565,2	39.859	1,71

Sumber: BPS data diolah

Tabel II.44
Angka Konsumsi Non Pangan RT per Kapita

No	Total Pengeluaran RT (Rp)	Jumlah RT	Rasio
1	243.683,4	39.859	1,54

Sumber: BPS data diolah

Tabel II.45
 Nilai Tukar Petani (NTP)

No	Uraian	Rasio			
		2009	2010	2011	2012
1	Indeks NTP	103,57	104,68	104,45	102,37

Sumber: BPS data diolah

Sampai dengan saat ini, salah satu data resmi yang bisa dijadikan ukuran dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani atau biasa disebut NTP.

NTP adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam bentuk persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang atau jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Sehingga, NTP dapat dikatakan sebagai cerminan atau indikator relatif tingkat kesejahteraan petani.

Semakin tinggi NTP, mencerminkan semakin sejahteranya para petani. Syaratnya, harga produk pertanian naik dengan hasil produksi yang tetap maka pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Di sisi lain, NTP juga bisa digunakan sebagai patokan kesejahteraan petani bila petani sebagai pemilik sekaligus penggarap. Jika petani hanya sebagai penggarap, berapa pun perubahan NTP relatif tidak terlalu berpengaruh. Hal ini dikarenakan keuntungan terbesar diraih oleh pemilik.

2. Fokus Fasilitas/Infrastruktur Daerah

Pembangunan dan peningkatan fasilitas infrastruktur sangatlah penting untuk memudahkan hubungan dan proses mobilisasi penduduk untuk mendukung pendistribusian barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada daerah yang sulit dijangkau atau terisolir.

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi

merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2011 panjang ruas jalan di Kabupaten Mukomuko adalah 935,55 Km. Dari data tersebut sekitar 16,35 persen atau 153 Km merupakan jalan nasional yang merupakan tanggungjawab dari Kementerian Pekerjaan umum. Sedangkan sebanyak 73,25 persen atau 685,33 Km merupakan tanggungjawab dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko. Dari panjang jalan tersebut dapat dibedakan lagi dari jenis jalannya. Dimana sepanjang 401 Km berjenis permukaan aspal, selebihnya memiliki beraneka ragam permukaan.

Tabel II.46
Data Jalan Kabupaten Mukomuko

No	Jenis Jalan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jalan Negara	153	153	153	153	153
2	Jalan Provinsi	43,62	97,22	97,22	97,22	97,22
3	Jalan Kabupaten	716,5	672,1	679,1	680,33	685,33
	Jenis Permukaan					
1	Diaspal	276,40	216,35	216,35	230,5	401
2	Kerikil	393,62	400,07	400,07	385,92	239,4
3	Tanah	46,47	55,67	62,67	63,9	76,1
4	Lainnya	-	-	-	-	-
	Kondisi Jalan					
1	Baik	500	577,2	585	613,56	394,08
2	Sedang	135	76	82,70	56,60	71,65
3	Rusak	48	18,9	11,40	10,17	71,65
4	Rusak Berat	33,5	-	-	-	179,13
	Kelas - Class					
1	Kelas III B	276,4	216,35	216,35	230,5	401,05
2	Kelas III C	393,62	400,08	400,08	385,93	239,4
3	Kelas tidak dirinci	46,48	55,68	62,68	63,91	76,10

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2012

Dewasa ini angkutan udara sudah menjadi alternatif bagi penumpang khususnya sebagai sarana transportasi jarak jauh menggantikan angkutan darat mengingat berbagai kelebihan yang dimilikinya, seperti waktu tempuh yang relatif pendek dan harga yang kian terjangkau.

Sejak tahun 2010, Kabupaten Mukomuko memiliki bandara udara yang secara komersil sudah mulai beroperasi. Kontribusi subsektor angkutan udara dalam PDRB Kabupaten Mukomuko pada kurun waktu tahun 2010-2011 masih relatif kecil dan lebih rendah jika dibandingkan dengan angkutan darat yaitu 0,06 persen.

Tabel II.47
Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya

Jenis Kendaraan	2009	2010	2011
Sedan	24	25	24
Jeep	56	58	58
Bus	43	44	18
Pick Up	295	354	378
Truck	282	343	391
Sepeda Motor	12.581	13.133	13.243
Motor	368	471	520
Jumlah	13.649	14.428	14.632

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2012

Tabel II.48
Banyaknya Lembaga Usaha

Badan Hukum	2007	2008	2009	2010	2011
PT	27	9	36	15	-
CV/Firma	156	103	163	72	-
Koperasi	3	3	3	4	112
Perorangan	313	172	795	549	-

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2012

Tabel II.49
Banyaknya Sarana Perdagangan

Badan Hukum	2010	2011
Pasar Umum	4	4
Pasar Desa	14	15
Toko	151	311
Kios	301	356
Warung	202	229
Rumah Makan	13	19
Jumlah	685	934

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2012

Sementara itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lainnya terutama bahan pangan maka keberadaan irigasi sangatlah penting, agar mampu menjaga ketersediaan bahan pangan. Untuk itu

Kabupaten Mukomuko giat melaksanakan cetak sawah baru untuk menjaga stabilitas pangan daerah. Berikut data irigasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.50
Jaringan Irigasi Desa di Kabupaten Mukomuko

No	Lokasi	Panjang (Meter) Dalam Kondisi Baik
1	Lubuk Angit	600
2	Air payang I	350
3	Sungai Besar	600
4	Selagan Kecil	275
5	Air Payang II	-
6	Sungai Enau	150
JUMLAH		1.975

Tabel II.51
Jaringan irigasi tingkat usaha tani

No	Lokasi	Panjang (m) kondisi baik	Keterangan
	DI Manjuto Kiri	5.750	Teknis
	DI Selagan	10.500	Teknis
	DI Air Payang I	4.100	Teknis
	DI Air Payang II	7.250	Teknis
	DI Gading Besar	6.500	Teknis
	DI Gading Kecil	8.120	Teknis
	Teramang Kecil	1.500	1/2 Teknis
	Air Buluh	750	1/2 Teknis

Tabel II.52
Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan
di Kabupaten Mukomuko Tahun 2011

Uraian	Luas Lahan (Ha)
Sawah	10.205
Perkebunan	117.815

Untuk luas lahan yang diusahakan di Kabupaten Mukomuko terlihat bahwa 10.205 Ha digunakan untuk lahan sawah sedangkan 117.815 digunakan untuk lahan perkebunan.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel II.53
Angka Kriminalitas

No	Tindak Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan
1	Penganiayaan Ringan	6	4
2	Penganiayaan Berat	8	7
3	Pembunuhan	2	1
4	Pencabulan	5	4
5	Perkosaan	2	2
6	Percobaan Pencurian	2	-
7	Pencurian Biasa	9	6
8	Pencurian Berat	22	16
9	Pencurian Kendaraan Bermotor	7	6
10	Penipuan	3	2
11	Penggelapan	8	2
12	Pemalsuan	2	1
13	Pemerasan	1	1
14	Pengeroyokan	1	1
15	Pengrusakan	6	2
16	Penyerobotan Tanah	2	-
17	Perbuatan tidak Menyenangkan	2	1
18	Perjudian	3	2
19	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	2
20	Nikah Tanpa izin	1	1
21	Melarikan anak perempuan	3	1
22	Pelanggaran Undang-Undang	2	-
23	Narkoba	4	4
24	Illegal Logging	1	1
25	Illegang Minning	-	1
26	Penyalahgunaan Migas	2	-
27	Perambahan Hutan Produksi terbatas	-	1
	Jumlah	106	72

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko 2011

Untuk banyaknya jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Mukomuko dapat terlihat bahwa dari 106 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 72 kasus atau 67,92 persen.

Tabel II.54
Jumlah Investor dan Tenaga Kerja di Kabupaten Mukomuko

No	Uraian	Jumlah (Org)
1	Investor PMA	15
2	Tenaga Kerja	3.686
3	Investor PMDN	50
4	Tenaga Kerja	1.649

Sumber: BPS data diolah

4. Fokus Sumberdaya Manusia

Tabel II.55
Rasio PNS Lulusan SI, S2 dan S3 Kabupaten Mukomuko

No	Uraian	Jumlah (Org)
1	Lulusan S1	1.311
2	Lulusan S2	4
3	Lulusan S3	-
4	Jumlah PNS	3.938
5	Rasio Lulusan S1, S2, S3	3,4

Sumber: BPS data diolah

Dari table di atas terlihat bahwa jumlah PNS yang ada di Kabupaten Mukomuko sebanyak 3.938, sedangkan lulusan S1 sebanyak 1.311.

Tabel II.56
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Mukomuko

No	Uraian	Jumlah (Org)
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	53.325
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	4.943
3	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif	58.268
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	99.896
5	Rasio Ketergantungan	58,33 %

Sumber: BPS data diolah

Jumlah ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif dapat dilihat ada table di atas. Rasio ketergantungan berjumlah 58,33 persen atau jumlah penduduk tidak produktif sebanyak 58.268 berbanding dengan 99.896 penduduk yang produktif.

2.5 Pola Ruang dan Struktur Ruang

2.5.1 Struktur Ruang

Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan Kabupaten Mukomuko sampai tahun 2010- 2030 dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2009 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu
- Analisis Struktur Ruang
- Konsep dan Strategi Pengembangan
- Kebijakan-kebijaksanaan pengembangan

Rencana Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan

Rencana hirarki pusat-pusat pelayanan/pusat pertumbuhan meliputi:

- Pusat Utama/PKW: Kota Mukomuko
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Ipuh
- Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) : Penarik dan Lubuk Pinang
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : Pasar Bantal
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): Ibu Kota Kecamatan (IKK) lainnya

Sistem hirarki pusat-pusat pelayanan direncanakan menunjukkan suatu sistem yang berjenjang dan optimal. Keseluruhan rencana struktur ruang Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.57

Rencana Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Mukomuko

Hirarki Kota	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang
PKW	Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan ▪ Pusat Jasa Perkantoran ▪ Pusat kegiatan jasa perdagangan ▪ Pusat kegiatan jasa pelayanan sosial kependudukan ▪ Pusat Pengembangan Agropolitan ▪ Pusat Pariwisata ▪ Pusat Transit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Perkantoran ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Perdagangan ▪ Permukiman ▪ Kegiatan Hiburan ▪ Kegiatan Perbankan ▪ Kegiatan Pengembangan Peti Kemas
PKL	Ipuh (pusat kegiatan primer industri)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat perekonomian dan jasa regional ▪ Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa ▪ Pusat pelayanan jasa sosial ekonomi ▪ Pusat pengembangan industry ▪ Pusat pengembangan koleksi dan distribusi ▪ Pusat perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pasar ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Pendidikan ▪ Permukiman ▪ Kegiatan Perbankan ▪ Kegiatan Industri ▪ Kegiatan Perkebunan ▪ Kegiatan Pertanian
PKLp	Lubuk Pinang dan Penarik (pusat pelayanan primer perekonomian)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat perekonomian dan jasa regional ▪ Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa ▪ Pusat pelayanan jasa sosial ekonomi ▪ Pusat pengembangan industry ▪ Pusat pengembangan koleksi dan distribusi ▪ Pusat perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pasar ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Pendidikan ▪ Permukiman ▪ Kegiatan Perbankan ▪ Kegiatan Industri ▪ Kegiatan Perkebunan ▪ Kegiatan Pertanian
PPK	Pasar Bantal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa ▪ Pusat pelayanan jasa sosial ekonomi ▪ Pusat perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pasar ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Pendidikan ▪ Permukiman
Pusat Pelay	PPL Lb Sanai, PPL Pondok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dan jasa skala pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pertanian

Hirarki Kota	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang
an Lingk ung n (PPL)	Makmur, PPL Lalang Luas, PPL Teras Terunjam, PPL Sungai Ipuh, PPL Dusun Baru, PPL Pondok Suguh, PPL Gajah Makmuri, PPL Arga jaya, PPL Talang Arah	wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkebunan ▪ Peternakan ▪ Perikanan

Sumber : Hasil Analisis 2010.

2.5.2 Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Mukomuko merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Mukomuko berfungsi sebagai berikut:

- a. alokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Mukomuko dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Nasional dan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;

- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Mukomuko yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, penataan kawasan hutan dan lain-lain;
- c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, perkembangan tataguna lahan, kesesuaian lahan, dan penataan kawasan hutan di wilayah ini.

Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Batasan mengenai kawasan lindung dan budidaya adalah sebagai berikut:

- Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembagunan yang berkelanjutan.
- Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia.

Penetapan Kawasan Hutan di Kabupaten Mukomuko yang meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, maupun taman nasional Kerinci Seblat mengacu pada peraturan menteri kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penggunaan ruangnya. Walaupun begitu, sampai dengan Tahun 2010, telah diajukan beberapa usulan peninjauan kembali dalam rangka melakukan pelepasan, perluasan, maupun perubahan fungsi ruang yang saat ini merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan produksi terbatas oleh pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun *review* atau pengajuan peninjauan Kawasan Hutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II.64

Usulan Peninjauan (Review) Kawasan Hutan di Kabupaten Mukomuko
 Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko 2010.

NO.	NAMA KAWASAN HUTAN	KABUPATEN	LUAS (Ha)	USULAN REVIEW (Ha)			SISA LUAS (Ha)	KETERANGAN
				ALIH FUNGSI	PELEPASAN	PENGUKUHAN		
1	CA. Mukomuko 1	Mukomuko	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	Menjadi TWA
2	HPT. Air Manjunt	Mukomuko	28,763.42	0.00	4,200.00	0.00	24,563.42	<i>Pelepasan</i>
3	HP. Air Dikit	Mukomuko	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	<i>Pelepasan</i>
4	HPT. Air Ipuh I	Mukomuko	20,544.65	0.00	8,700.00	0.00	11,844.65	<i>Pelepasan</i>
5	HP. Air Teramang	Bengkulu Utara	4,854.00	0.00	540.00	0.00	4,314.00	<i>Pelepasan</i>
6	HPT. Air Ipuh II	Mukomuko	20,667.00	0.00	3,800.00	0.00	16,867.00	<i>Pelepasan</i>

Tabel II. 65

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No	Indikator	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		2011	2012	2013	2014	2015	2015
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
	a. Pertumbuhan PDRB (%)	4.75-5.00	5.00-5.25	5.25-5.50	5.50-5.75	5.75-6.00	5.75-6.00
	b. Laju inflasi (%)	5.5-5.0	5.0-4.5	4.5-4.0	4.0-3.5	3.5-3.0	3.5-3.0
	c. PDRB per kapita (Rp)	3742.680-3817.554	3817.554-3892.428	3892.428-3967.302	3967.302-4042.176	4042.176-4117.050	4042.176-4117.050
	d. IPM	70.11-70.41	70.41-70.71	70.71-71.01	71.01-71.31	71.31-71.61	71.31-71.61
A.2	Kesejahteraan Sosial						
	Pendidikan						
	a. Angka melek huruf (%)	93.45-93.47	93.47-93.49	93.49-93.51	93.51-93.53	93.51-93.53	93.51-93.53
	b. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7.32-7.37	7.37-7.42	7.42-7.47	7.47-7.52	7.52-7.57	7.52-7.57
	c. Angka partisipasi murni (%)						
	SD	96.50-96.90	96.90-97.30	97.30-97.70	97.70-98.10	98.10-98.50	98.10-98.50
	SLTP	80.00-81.50	81.50-83.00	83.00-84.50	84.50-86.00	86.00-87.50	86.00-87.50
	SLTA	48.50-51.50	51.50-54.50	54.50-57.50	57.50-60.50	60.50-63.50	60.50-63.50
	d. Angka partisipasi kasar (%)						
	SD	103.00-105.00	105.00-107	107-109	109-111	111-114	111-114
	SLTP	96.06-96.10	96.10-96.14	96.14-96.18	96.18-96.22	96.22-96.26	96.22-96.26
	SLTA	78.74-	78.80-	78.86-	78.92-	78.98 -	78.98 - 79.04

		78.80	78.86	78.92	78.98	79.04	
	Kesehatan						
	a. Angka kematian bayi	34-32	32-30	30-28	28-26	26-24	26-24
	b. Angka usia harapan hidup (tahun)	67.90-68.00	68.00-68.10	68.10-68.20	68.20-68.30	68.30-68.40	68.30-68.40
	c. Persentase balita gizi buruk (%)	17.1-16.1	16.1-15.1	15.1-14.1	14.1-13.1	13.1-12.1	13.1-12.1
	d. Prevalensi Malaria	28-26	26-24	24-22	22-20	20-18	20-18
	e. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93.80-94.00	94.00-94.20	94.20-94.40	94.40-94.60	94.60-94.80	94.60-94.80
	f. Angka Kesakitan DBD	32-28	28-24	24-20	20-16	16-12	16-12
	g. Angka Kematian Ibu	1.29-1.23	1.23-1.20	1.20-1.17	1.17-1.14	1.14-1.11	1.14-1.11
	h. Cakupan Peserta KB	77.57-77.30	77.30-77.03	77.03-76.76	76.76-76.49	76.49-76.22	76.49-76.22
	k. Jumlah PKM yang memenuhi standar	16	16	16	16	16	16
	Kemiskinan						
	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (%)	18.08-16.08	16.08-14.08	14.08-12.08	12.08-10.08	10.08-8.08	10.08-8.08
	Kesempatan kerja						
	Rasio penduduk yang bekerja	61.000-66.000	66.000-72.000	72.000-78.000	78.000-84.000	84.000-90.000	84.000-90.000
	Pengangguran terbuka (%)	4,91-4,51	4,51-4,11	4,11-3,71	3,71-3,31	3,31-2,91	3,31-2,91
	Kriminalitas						
	Angka kriminalitas yang tertangani	30.00-35.00	35.00-40.00	40.00-45.00	45.00-50.00	50.00-55.00	50.00-55.00
A.3	Seni Budaya dan Olah Raga						
	Jumlah grup kesenian	35	38	41	43	46	46
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B.1	Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
	Pendidikan dasar						
	a. Angka putus sekolah	0.31-0.25	0.25-0.19	0.19-0.13	0.13-0.07	0.07-0	0.08-0
	b. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	0.56-0.60	0.60-0.64	0.64-0.68	0.68-0.72	0.72-0.76	0.72-0.76
	c. Rasio guru/murid	6.00-7.00	7.00-8.00	8.00-9.00	9.00-10.00	10.00-11.00	10.00-11.00
	Pendidikan menengah						
	a. Angka partisipasi sekolah	0.66-0.60	0.60-0.54	0.54-0.48	0.48-0.42	0.42-0.36	0.42-0.36
	b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0.38-0.40	0.40-0.42	0.42-0.44	0.44-0.46	0.46-0.48	0.46-0.48
	c. Rasio guru terhadap murid	8.00-9.00	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	12.00-13.00
	Kesehatan						
	a. Rasio posyandu per satuan balita	0.16-0.18	0.18-0.20	0.20-0.22	0.22-0.24	0.24-0.26	0.24-0.26
	d. Rasio poskesdes per desa	26,9-28	28-29.1	29.1-30.2	30.2-31.3	31.3-32.4	31.3-32.4
	e. Rasio dokter per satuan penduduk	5,3-6	6-7.7	7.7-9	9-10.1	10.1-11.1	10.1-11.1
	f. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1.48-1.50	1.50-1.52	1.52-1.54	1.54-1.56	1.56-1.58	1.56-1.58
	g. Persentase Desa Siaga aktif	132	132	132	132	132	132
	Sarana dan Prasarana Umum						
	a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	613.560-700	700-725	725-750	750-775	775-800	775-800
	b. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	49-50	50-51	51-52	52-53	53-54	53-54
B.2	Pelayanan Penunjang						
	Ketenagakerjaan						

	a. Angka partisipasi angkatan kerja (%)	66,84-67.00	67.00-69.00	69.00-71.00	71.00-73.00	73.00-75.00	73.00-75.00
	KB dan KS						
	a. akseptor KB	24,213-25,213	25,213-26,213	26,213-27,213	27,213-28,213	28,213-29,213	28,213-29,213
	Perpustakaan						
	a. Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1
	b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	200-250	250-300	300-350	350-400	400-450	400-450
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
C.1	Kemampuan Ekonomi Daerah						
	a. Produktivitas 9 sektor PDRB (Rp) :						
	1) Pertanian	263756-273947	273947-284138	284138-294329	294329-304520	304520-314711	304520-314711
	2) Pertambangan & penggalian	34922-36053	36053-37184	37184-38315	38315-39446	39446-40577	39446-40577
	3) Industri pengolahan	37722-39722	39722-41722	41722-43722	43722-45722	45722-47722	45722-47722
	4) Listrik	704-734	734-764	764-794	794-824	824-854	824-854
	5) Bangunan	15720-16605	16605-17490	17490-18375	18375-19260	19260-20145	19260-20145
	6) Perdagangan	102388-105888	105888-109388	109388-112888	112888-116388	116388-119888	116388-119888
	7) Pengangkutan & komunikasi	22332-23576	23576-24830	24830-26084	26084-27338	27338-28592	27338-28592
	8) Keuangan	20076-21432	21432-22788	22788-24144	24144-25500	25500-26856	25500-26856
	9) Jasa-jasa	36153-38518	38518-40883	40883-43248	43248-45613	45613-47978	45613-47978
C.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
	Aksesibilitas daerah						
	a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	8%-9%	9%-10%	10%-11%	11%-12%	12%-13%	12%-13%
	b. Jumlah orang melalui bandara per tahun	2880	5000-6000	6000-7000	7000-8000	9000-10000	9000-10000
	Fasilitas listrik						
	a. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	75%-78%	78%-80%	80%-82%	82%-84%	84%-86%	84%-86%
	Iklim Berinvestasi						
	a. Jumlah demo	3	2	1	0	0	0
	b. Lama proses perijinan (hari)	3	3	3	3	3	3

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Letak Geomorfologis Kabupaten Mukomuko yaitu terletak di pantai barat pulau Sumatera. Pada satu sisi mempunyai keuntungan yakni masih belum termanfaatkannya potensi kelautan secara maksimal sedangkan pada sisi lainnya dikarenakan berhadapan langsung dengan laut bebas maka beresiko dengan bencana Tsunami.
2. Bencana gempa yang terjadi pada tahun 2007 telah menimbulkan kerusakan fisik pada beberapa bangunan di Kabupaten Mukomuko. Sementara itu dari segi non fisik berdampak negatif pada psikologis/trauma anak-anak, aspek ekonomi dan aspek sosial kemasyarakatan.
3. Permasalahan lingkungan hidup terutama masyarakat yang bermukim dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Hal ini terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
4. Kurangnya disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dalam membuang sampah, serta masih terdapat kekurangan dalam pengadaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.
5. Angka Pengangguran yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pembukaan lapangan kerja baru yang belum optimal mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran.
6. Peningkatan derajat kesehatan dengan melihat kepada perilaku hidup sehat, angka harapan hidup, angka kelahiran dan kematian ibu saat persalinan masih belum maksimal.
7. Untuk mewujudkan kemakmuran maka peningkatan PDRB mempunyai peran penting disamping pengendalian laju inflasi. Dimana kemakmuran akan memunculkan kesejahteraan.

8. Kurang bertumbuhkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini sangat berpotensi dikarenakan daya serap tenaga kerja pada bidang ini cukup tinggi.
9. Masih terdapatnya masyarakat yang masih buta huruf. Hal ini dikarenakan karena masih lemahnya manajemen kependidikan sehingga masih adanya buta huruf dan putus sekolah.
10. Masih kurangnya kompetensi Sumberdaya Pendidik dalam mendukung kurikulum sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas/mutu pendidikan.

3.2 Isu Strategis

1. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Pengendalian pertumbuhan penduduk adalah penting bagi Kabupaten Mukomuko dengan beberapa pertimbangannya adalah

- a. Struktur penduduknya menurut umur memperlihatkan masih relatif tinggi proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun. Hal ini menyebabkan relatif tingginya rasio beban tanggungan dari penduduk usia produktif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rasio ketergantungan sebesar 58,33 persen.
- b. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita penduduk masih relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 adalah 5,58 persen, pada tahun 2010 sebesar 5,74 persen sedangkan tahun 2011 menjadi 6,18 persen. Dengan demikian dapat diterangkan bahwa terjadi perkembangan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun. Yang menjadi pendorong perkembangan ini adalah adanya perbaikan sarana transportasi, dibukanya beberapa industri perkebunan dan lain sebagainya. Untuk itu perlu lebih diperhatikan lagi mengingat tujuan pembangunan yakni menciptakan Masyarakat yang tangguh, berdaya saing dan sejahtera.
- c. Letak geografi yang dilalui oleh Jalinbar, potensi sumberdaya lahan dan kelautan yang dimiliki, serta geliat perekonomian yang ada berpotensi untuk meningkatnya migrasi masuk ke Kabupaten Mukomuko pada masa yang akan datang.

2. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur yang terbatas tentu akan menghambat laju pembangunan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur adalah sebuah keniscayaan bagi percepatan laju pembangunan. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Mukomuko. Sebagai kabupaten yang masih baru, ketersediaan infrastrukturnya relatif masih terbatas terutama infrastruktur fisik prasarana jaringan jalan, dan ketenagalistrikan, serta infrastruktur kelembagaan untuk perkuatan ekonomi kerakyatan terutama bagi petani dan nelayan. Masih adanya sarana jalan yang rusak sebanyak 179,13 Km, sedangkan untuk tenaga listrik masih ada masyarakat yang belum menikmatinya kurang lebih 28.872 keluarga serta hanya 2.450 yang menjadi pelanggan Air Minum. Untuk sarana perdagangan di Kabupaten Mukomuko terdapat 4 pasar Umum, 15 pasar desa, 311 toko, 356 kios 229 warung dan 19 rumah makan. Dengan perbaikan dan peningkatan dari infrastruktur tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

3. Bencana Alam (Gempa, Tsunami, dan Abrasi pantai)

Sama halnya dengan wilayah lain di sepanjang pantai barat pulau sumatera, Kabupaten Mukomuko terletak pada kawasan yang berada diatas pertemuan dua lempeng bumi yang paling aktif pergerakannya, yakni lempeng euro asia dengan lempeng australia. Oleh sebab itu, Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam kategori daerah rawan gempa dan tsunami. Gempa sering terjadi di daerah ini dan pada tahun 2007 terjadi gempa yang cukup besar, yakni 7,9 pada skala Richter. Peristiwa gempa pada saat itu menghancurkan berbagai aset yang ada, hanya dalam waktu sesaat. Disamping bencana alam yang berkaitan dengan kegempaan, wilayah pesisir Kabupaten Mukomuko juga sering mengalami abrasi pantai. Hal ini mengingat letaknya yang membentang disepanjang pantai dan langsung berhadapan dengan lautan samudera.

4. Iklim Investasi

Data PDRB memperlihatkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Mukomuko masih didominasi oleh sektor primer, ditandai oleh dominannya kontribusi sektor primer terutama sektor pertanian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki potensi daya tarik investasi yang besar berupa sumberdaya alam. Namun demikian, potensi daya tarik investasi yang bersumber dari potensi sumberdaya alam ini perlu diperkuat dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan menarik. Hal ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri hilir dan sektor jasa yang mampu memberikan nilai tambah (*Added Value*) yang tinggi. Dengan demikian, struktur perekonomian daerah Kabupaten Mukomuko akan lebih diperkuat karena ditopang oleh kegiatan perekonomian dengan kandungan nilai tambah yang tinggi.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Kabupaten Mukomuko adalah kabupaten baru hasil pemekaran yang umurnya belum sampai satu windu. Sebagai kabupaten yang masih baru tentu belum terbentuk kemapanan nilai-nilai pada tata kelola pemerintahannya. Kondisi ini akan memudahkan bagi pembentukan nilai-nilai keunggulan dalam tatakelola pemerintahan pada periode lima tahun ke depan. Nilai-nilai keunggulan pada tata kelola pemerintahan ini akan memperkuat daya saing Kabupaten Mukomuko terhadap daerah lainnya. Perkuatan daya saing tersebut adalah berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas program, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya tarik investasi. Tata kelola pemerintahan dimaksud adalah tatakelola yang berbasiskan kinerja disertai dengan transparansi dan akuntabilitas.

6. Pangan dan Gizi

Permasalahan actual di bidang ketahanan pangan adalah (1) ketergantungan terhadap beras, kurangnya diversifikasi pangan baik vertical maupun horizontal. (2) Kebijakan pemerintah yang terfokus pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan dengan sasaran utama swasembada beras pada tingkat harga murah. (3)

diabaikannya pemberdayaan petani dan masyarakat, dalam hal ini adalah tingkat pendapatan sehingga dapat memicu krisis pangan yang dapat berakibat lemahnya daya beli masyarakat. (4) adanya dilemma kebijaksanaan yaitu upaya peningkatan produksi disatu pihak dan pada sisi lain harga ditetapkan murah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah. Untuk jangka panjang masalah kekurangan pangan dan gizi secara perlahan-lahan namun pasti akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita serta rendahnya usia harapan hidup, sedangkan dampak lainnya adalah rendahnya partisipasi sekolah dan produktivitas kerja serta lambatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk Permasalahan kekurangan gizi ini bukan saja menjadi permasalahan daerah ataupun provinsi tapi sudah menjadi permasalahan dunia. Untuk itu diharapkan ketersediaan bahan pangan secara kontinyu, kewilayahan, dan waktu. Kemampuan mengakses pangan dipengaruhi oleh daya beli yang sudah tentu berkaitan erat dengan tingkat pendapatan.

7. Emisi Gas Rumah Kaca

Pengendalian perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusia pada saat ini dan akan datang. Berbagai kejadian alam telah menunjukkan bahwa perubahan suhu, kenaikan permukaan laut, curah hujan, dan iklim ekstrim telah mengakibatkan berbagai dampak buruk terhadap kehidupan. Pemerintah telah berupaya dalam menghadapi dampak perubahan iklim tersebut dengan memberikan komitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga ada tahun 2020.

8. Pengangguran

Tingkat pengangguran cukup tinggi di Kabupaten Mukomuko yakni 2,68 persen. Walaupun pada saat ini sudah terjadi pengurangan angka pengangguran sebesar 1,53 persen namun diharapkan pembukaan lapangan pekerjaan baru akan merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi permasalahan pengangguran. Saat ini di

Kabupaten Mukomuko terdapat 798 perusahaan makanan dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.466 orang, industri kayu dan sejenisnya 210 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 321 orang dan furniture sebanyak 106 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 297 orang. Diharapkan dengan adanya penyediaan lapangan kerja baru maka dapat mengurangi angka pengangguran ini.

9. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bukan hanya di Kabupaten Mukomuko saja melainkan berbagai penjuru dunia. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mukomuko tahun 2009 adalah sebanyak 23.570 orang atau 15,39 persen, dan angka ini terus menurun menjadi 22.000 orang atau 14,07 persen. Sedangkan pada tahun 2011 angka kemiskinan menjadi 19.062 orang atau 4.060 keluarga miskin. Dengan program terpadu yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Mukomuko.

10. Pendidikan

Berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk Kabupaten Mukomuko yang berumur 10 Tahun ke atas mayoritas hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Jumlahnya mencapai 56,10 persen, dan SLTP berjumlah 23,32 persen dan SLTA berjumlah 15,10 persen. Ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kependudukan Kabupaten Mukomuko didominasi oleh usia muda dan produktif tetapi kualitasnya masih memerlukan perhatian yang serius. Rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Mukomuko untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

11. Peningkatan derajat kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan jika dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia terutama menyangkut Angka harapan hidup. Angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh angka kematian bayi. Makin tinggi angka harapan hidup maka makin

rendah kematian bayi. Adapun yang sangat mempengaruhi angka harapan hidup ini adalah lamanya bayi disusui, penolong kelahiran, pendidikan kaum perempuan, perilaku hidup sehat dan kemudahan serta keterjangkauan sarana kesehatan. Dengan demikian semakin tinggi derajat kesehatan semakin bertambah harapan hidup dan semakin tinggi derajat kesehatan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera. Sejahtera dalam arti kata adalah suatu kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat untuk penghidupan yang layak. Perwujudan masyarakat sejahtera juga merupakan jalan panjang yang biasanya dimulai dengan perwujudan masyarakat yang makmur. Dengan kata lain terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera akan menciptakan kemandirian pada semua bidang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa sasaran pembangunan Kabupaten Mukomuko untuk 20 tahun ke depan diarahkan kepada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun keberadaan masyarakat yang sejahtera tersebut hendaknya dalam kondisi yang aman, nyaman, menjunjung tinggi semangat persatuan, berkeadilan, profesionalisme, berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 20 tahun maka Visi pembangunan Kabupaten Mukomuko dapat dirumuskan yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Tangguh, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Penjelasan dari Visi diatas adalah

1. Tangguh

Tangguh diartikan bahwa suatu keadaan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang kuat, pantang menyerah dan bahu-membahu dalam pembangunan. Keadaan ini akan menjadikan Masyarakat yang kuat disemua lini. Apalagi pada saat ini perubahan iklim, globalisasi menjadi isu sentral di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini terwujudnya masyarakat yang tangguh adalah suatu keharusan agar tercapainya kesejahteraan.

2. Berdaya Saing

Berdasarkan tinjauan berbagai literatur mengenai daya saing disimpulkan bahwa daya saing dalam konteks perekonomian daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Jadi Berdaya Saing yang dimaksud adalah mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro perusahaan atau individu, namun mencakup aspek yang lebih luas. Sebagaimana dipahami bahwa pelaku ekonomi daerah mencakup unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang kesemuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi daerah yang sinergis. Kata kunci daya saing adalah kompetisi, yaitu kondisi persaingan dengan para kompetitor dalam suatu sistem perekonomian yang terbuka. Tujuan akhir dari kondisi yang berdaya saing adalah meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.

3. Sejahtera

sejahtera merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual. Dalam visi ini, sejahtera mempunyai makna kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mukomuko dapat dipenuhi secara lahir dan bathin. Masyarakat yang sejahtera merupakan wujud dari masyarakat yang adil dan makmur, baik dari sisi material maupun spiritual. Kesejahteraan juga tercermin dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat memiliki akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan serta berusaha dalam semua bidang yang berbasis agroindustri.

Pernyataan Visi pembangunan Kabupaten Mukomuko di atas merupakan keinginan luhur masyarakat yang harus dijadikan inspirasi dari setiap kegiatan pembangunan. Oleh karena itu setiap program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan daerah harus mengacu kepada visi pembangunan yang diterjemahkan lebih operasional ke dalam misi pembangunan Kabupaten Mukomuko.

4.2 Misi Pembangunan

Dari Visi Pembangunan Kabupaten Mukomuko tahun 2005-2025 dapat dijabarkan ke dalam beberapa misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian alam yang bijaksana.
3. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, tangguh, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Visi daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 yakni **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Tangguh, Berdaya Saing dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut sudah disusun Misi, maka diperlukan penyusunan arah kebijakan agar pembangunan daerah yang dilaksanakan selaras dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Untuk Masing-masing Misi

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2005-2025 untuk masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Sasaran Pokok 1

- Terwujudnya Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan religius

Arah Kebijakan

- Meningkatkan pelayanan social dan mutu kesehatan.
- Meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
- Meningkatkan kualitas moral dalam kehidupan beragama.
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak serta terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah.

- Menggiatkan pemasyarakatan serta pembinaan prestasi olah raga.
- Meningkatkan potensi kewirausahaan pemuda dalam pembangunan.

2. Mewujudkan pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian alam yang bijaksana.

Sasaran Pokok 2

- Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam.

Arah Kebijakan

- Penyelenggaraan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam.
- Peningkatan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara berkesinambungan.

Sasaran Pokok 3

- Meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian Lingkungan.

Arah Kebijakan

- Optimasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- Meningkatkan kelestarian hidup dan pengelolaan persampahan.
- Meningkatkan penanggulangan dan pengelolaan kawasan rawan bencana.

3. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, tangguh, mandiri dan berdaya saing.

Sasaran Pokok 4

- Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh.

Arah Kebijakan

- Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak serta industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung.
- Optimalisasi Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Pokok 5

- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.

Arah Kebijakan

- Mengembangkan pusat ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
- Meningkatkan peranan usaha mikro kecil menengah dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran Pokok 6

- Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung perekonomian daerah.

Arah Kebijakan

- Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum.
- Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan pertambangan dan kelistrikan.
- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Perluasan areal persawahan.

4. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sasaran pokok 7

- Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa.

Arah Kebijakan

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan SPM yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat.
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme.
- Meningkatkan penegakan supremasi hukum.
- Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sasaran pokok 8

- Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

Arah Kebijakan

- Meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan yang berbasis kinerja

Tabel V.1

Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan
		Uraian	Indikator dan Target	
Terwujudnya Kabupaten Mukomuko yang Tangguh, Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera.	Misi I Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.	1. Terwujudnya Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan religius	1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75-78,62. 2. Jumlah Tenaga Kerja Perempuan sebanyak 384.313orang. 3. Jumlah jemaah Haji sebanyak 300 orang.	1. Meningkatkan pelayanan social dan mutu Kesehatan. 2. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. 3. Meningkatkan kualitas moral dalam kehidupan beragama. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak serta terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan. 5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk unggulan daerah 6. Menggiatkan pemasyarakatan serta pembinaan prestasi olah raga. 7. Meningkatkan potensi kewirausahaan pemuda dalam pembangunan.

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan
		Uraian	Indikator dan Target	
	Misi II Mewujudkan pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian alam yang bijaksana.	1. Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam.	1. Kontribusi sumberdaya alam terhadap PDRB sebesar 45 persen. 2. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 5,42 persen.	1. Penyelenggaraan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam. 2. Peningkatan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara berkesinambungan
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian Lingkungan.	1. Tingkat pencemaran udara, dan air sebesar 5 persen 2. Laju kerusakan hutan dan lahan kritis 12 persen. 3. Jumlah kawasan bencana tsunami 3 kawasan dan gempa 11 kawasan	1. Optimasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. 2. Meningkatkan kelestarian hidup dan pengelolaan persampahan. 3. Meningkatkan penanggulangan dan pengelolaan kawasan rawan bencana.
	Misi III Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, tangguh, mandiri dan berdaya saing.	1. Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh.	1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2-6,3 persen. 2. Indeks harga sebesar 7,69 persen.	1. Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak serta industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung. 2. Optimalisasi Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan perikanan.
		2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.	1. Pendapatan Per kapita sebesar Rp.43.329.250 ,-	1. Mengembangkan pusat ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan
		Uraian	Indikator dan Target	
			2. Angka kemiskinan sebesar 8 persen. 3. Angka pengangguran sebesar 1,87 persen.	kerja. 2. Meningkatkan peranan usaha mikro kecil menengah dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
		3. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung perekonomian daerah.	1. Proporsi jaringan jalan sebesar 825 Km. 2. Peningkatan Daya Listrik 50 persen 3. Luas lahan sawah beririgasi 14.558,58 Ha.	1. Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum. 2. Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan pertambangan dan kelistrikan. 3. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 4. Perluasan areal persawahan
	Misi IV Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.	1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa.	1. terselesaikannya kasus pelanggaran hukum 85 persen	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan SPM yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme. 3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum. 4. Meningkatkan ketertiban dan keamanan

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan
		Uraian	Indikator dan Target	
				masyarakat.
		2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.	1. Peningkatan penilaian terhadap system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi B 2. Nilai Opini Keuangan WTP	1. Meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan SOP yang berlaku. 2. Meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan yang berbasis kinerja.

Tabel V.2
Tahapan Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran Pokok dan arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan religius							
1. Meningkatkan pelayanan dan mutu Kesehatan.	1. Angka Harapan Hidup.	66,72	67,81	68,40	72,52	75,17	75,17
	2. Angka Kematian Ibu melahirkan.	1,29	1,23	1,14	1,09	1,05	1,05
	3. Angka Kematian Bayi	34	32	26	22	14	14
	4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.	-	1:2.939	1:2.467	1:1.763	1:1.260	1:1.260
	5. Rasio Prevalensi Penyakit Malaria, DBD dan TBC	28	26	20	16	10	10
2. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan	1. Angka Melek Huruf.	93,23	94,06	94,65	95,36	96,08	96,08
	2. Rasio Ketersed	0.56	0,60	0,72	0,80	0,88	0,88

Sasaran Pokok dan arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
memperoleh pendidikan yang bermutu.	iaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah.						
	3. Rasio Guru Per Sekolah.	-	8	12	16	21	21
	4. Rasio Guru Per Siswa.	-	6	10	16	20	20
	5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar.	-	109,68	110,55	106,73	103,05	103,05
	6. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah.	-	90,01	93,97	97,54	100	100
	7. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Atas.	-	53,47	60,12	76,73	97,93	97,93
	8. Angka partisipasi Murni Pendidikan Dasar.	-	97,65	98,87	99,37	99,87	99,87
	9. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah.	-	75,72	88,12	97,30	99,75	99,75
	10. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Atas.	-	47,23	53,09	85,50	99,12	99,12
3. Meningkatkan kualitas moral dalam kehidupan beragama.	1. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk.	49	54	59	62	68	68

Sasaran Pokok dan arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
Sasaran pokok 4 : Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh.							
3. Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak serta industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung.	1. Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB.	25,71	30,70	31,58	32,66	33,79	33,79
	2. Persentase tenaga kerja di industri menengah dan besar.	0,92	1,71	1,79	3,64	7,42	7,42
4. Optimalisasi Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan perikanan.	1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.	57,91	44,31	42,66	41,56	40,49	40,49
	2. Persentase tenaga kerja di sektor pertanian.	75,49	62,90	71,04	69,10	67,22	67,22
Sasaran Pokok 5 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.							
4. Mengembangkan pusat ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga kerja.	1. Tingkat pengangguran.	10,05	4,21	3,21	2,45	1,87	1,87
	2. Rasio tenaga kerja terdidik dan terampil	-	0,950	0,951	0,952	0,953	0,954
5. Meningkatkan peranan usaha mikro	1. Persentase koperasi	15	17	20	24	30	30

Sasaran Pokok dan arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
kecil menengah dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdayasaing.	aktiv.						
	2. Jumlah UMKM	738	800	870	940	1010	1080
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.	1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan.	18.816	17.916	17.016	16.116	15.216	14.316
	2. Jumlah panti asuhan/panti jompo.	-	-	-	1	2	2
Sasaran Pokok 6 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung perekonomian daerah.							
5. Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum.	1. PersentasePanjang jaringan jalan dalam kondisi baik.	45	50	65	70	80	80
	2. persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik.	32,96	42,07	49,71	57,63	66,81	66,81
6. Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan pertumbuhan dan kelistrikan.	1. Kontribusi Pertumbuhan dan Listrik terhadap PDRB	0,65	0,78	0,83	0,89	0,94	0,94
	2. Persentase rumah tangga yang belum menggu	32,08	18,32	11,19	6,55	2,78	2,78

Sasaran Pokok dan arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
	nakan listrik.						
3. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.	1. Luas lahan sawah irigasi	-	4.466	6.522,72	9,744,84	14.558,58	14.558,58
	2. Persentase rumah tangga yang penggunaa PDAM	6,45	6,06	6,29	6,55	6,81	6,81
Sasaran Pokok 7 : Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa.							
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan SPM yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat.	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditidak lanjuti.	-	-	50	75	80	80
6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme.	1. Persentase PNS yang berpendidikan S1 dan S2	35	40	45	50	55	55
	2. PersentaseJumlah PNS yang telah mengikuti kursus.	-	1	1,2	1,4	1,6	1,6
3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum.	1. Jumlah pelanggaran hukum. Yang ditangani (%)	57	60	63	66	69	69
4. Meningkatkan ketertiban	1. Angka kriminalitas %	30	50	60	70	80	80

Sasaran Pokok dan arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
dan keamanan masyarakat.	2. Rasio Satpol PP/linmas per satuan penduduk.	-	150	165	181	191	191

2.6 Tahapan dan Prioritas

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang serta menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diuraikan kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

a. Tahapan Lima Tahun I (2005-2010)

Masa berlaku dokumen RPJP Daerah Kabupaten Mukomuko ditetapkan selama 20 tahun. Untuk itu periode pertama dari RPJPD tersebut adalah Tahun 2005-2010 atau masa periode RPJMD pertama. Berdasarkan tahap pembangunan tahap sebelumnya maka RPJMD pertama diarahkan kepada

kesejahteraan dan keadilan sosial dalam pemerintahan yang baik.

Agenda pembangunan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan bertanggungjawab.

2. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3. peningkatan infrastruktur perekonomian daerah.
4. percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, tangguh, mandiri dan berdaya saing.
5. peningkatan infrastruktur daerah.
6. peningkatan sosial budaya masyarakat yang berahlak mulia.
7. penciptaan pemerintahan yang baik.

Diharapkan dengan titik awal pembangunan ini akan menjadikan fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.

b. Tahapan Lima Tahun II (2010-2015)

Atas dasar pelaksanaan pembangunan pada RPJMD tahap I dan diharapkan berkelanjutan pada RPJMD Tahap II, maka pembangunan pada RPJMD Tahap II diharapkan semakin kokoh dan tangguh. Adapun agenda pembangunan dalam kurun waktu kedua dari pelaksanaan RPJPD mempunyai prioritas kepada:

1. Kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan
2. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (Pekerjaan Umum, perhubungan, informatika dan komunikasi.
4. Peningkatan sumberdaya manusia (agama, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, dan keluarga berencana).
5. Pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
6. Kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi.
7. Penegakan hukum, ketertiban umum dan pemerintahan yang bersih.

Pada pelaksanaan RPJMD II ini diharapkan Kabupaten Mukomuko mampu mengurangi dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. bukan hanya jumlah masyarakat yang miskin saja tetapi akan lebih merujuk kepada peningkatan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga akan menciptakan suatu sikap kebersamaan.

Kemudian selain dari pada itu untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan penduduk maka pemerintah Kabupaten Mukomuko tengah bersiap diri membenahi infrastruktur penunjang yang ada untuk revitalisasi pertanian. Ketahanan pangan menjadi kunci utama menjaga stabilitas bahan pangan mengingat laju alih fungsi lahan semakin tinggi. penciptaan sumberdaya manusia yang handal dan berdaya guna menyongsong inovasi teknologi diharapkan akan membuka kesempatan dan peluang pengembangan sosial.

Penegakan hukum, ketertiban umum dan pemerintahan yang ditujukan agar tata pemerintahan yang baik serta kepastian akan hukum dalam segala hal mampu diberikan dan dijamin oleh pemerintah Kabupaten Mukomuko.

c. Tahapan Lima Tahun III (2015-2020)

Dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD II, maka RPJMD III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada

1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
2. Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya yaitu dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program wajib belajar 9 tahun, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap

teknologi, semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal iptek.

3. Pembangunan sektor ekonomi dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat difokuskan pada pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian dengan fokus utama agroindustri yang merupakan keterkaitan pembangunan sektor pertanian yang telah direncanakan pada tahap pembangunan sebelumnya dengan sasaran pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat. Pada saat yang sama juga dikembangkan sektor jasa, perdagangan dan pariwisata sebagai pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Pembukaan dan penguatan peluang investasi di daerah semakin diperluas sebagai faktor pendorong bergerak majunya perekonomian menuju perekonomian yang stabil dan maju.
4. Sejalan dengan membaiknya kesejahteraan rakyat, semakin merata dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak, tercapainya kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mantapnya budaya serta karakter daerah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, sejalan dengan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan pada bidang pemerintahan masih tetap difokuskan pada penataan kembali sistem birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang menyeluruh.

5. Pada tahap ini masih dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah, sehingga aparatur memiliki kinerja yang baik, produktivitas tinggi serta kreativitas optimal. Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan pelayanan prima terhadap masyarakat dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
6. Selain itu pada tahap ini juga fokus pada peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, penegakan supremasi hukum dan HAM, peningkatan ketentraman dan ketertiban, peningkatan proses politik dan budaya politik, lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan.

d. Tahapan Lima Tahun IV (2020-2025)

Sesuai dengan tujuan dan pencapaian pelaksanaan RPJMD tahap III maka pada RPJMD Tahap IV akan menjadikan atau menciptakan Kabupaten Mukomuko yang Tangguh dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera. Suatu tatanan masyarakat yang maju, makmur yang ditandai dengan kesejahteraan dengan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam dan manusia.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan

1. terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum;
2. terciptanya rasa aman dan adil bagi masyarakat.
3. Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan pada tahap sebelumnya dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi, semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal iptek.

4. Dalam pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan indeks kesehatan (umur harapan hidup). Hal ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko dengan didukung oleh teknologi, terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berdaya guna, terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan, dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin meningkat.
5. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah. Pengembangan sektor jasa dan perdagangan semakin ditingkatkan sebagai optimalisasi potensi daerah menuju Kabupaten Mukomuko yang berdaya saing tinggi. Dalam bidang pariwisata difokuskan dengan terus meningkatkan pembangunan infrastuktur pariwisata yang telah berkembang dan menggali potensi pariwisata baru yang potensial khususnya ekowisata, dengan memanfaatkan dan memperhatikan keterpaduan antara sumberdaya yang ada, meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan yang baik.

BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam kerangka regulasi. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJPD Kabupaten Mukomuko bukan hanya penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat legitimasi Peraturan Daerah yang menjadi instrument penting untuk mengarahkan, evaluasi dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten Mukomuko, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Hal ini menyatakan bahwa RPJPD merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan hingga akhir tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Mukomuko 2005-2025, maka seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkan secara kreatif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat serta pemangku Kepentingan lainnya berkewajiban untuk mewujudkan Visi, Misi Pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
2. Unit Satuan Kerja Vertikal setingkat, maupun lembaga lokal maupun lembaga International pemerintah atau non pemerintah yang melakukan pembangunan di Kabupaten Mukomuko serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasi berkewajiban berkoordinasi dengan pemerintahan

daerah untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Mukomuko.

3. Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih setiap lima tahun, maka RPJP Daerah ini juga sekaligus menjadi koridor bagi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko serta dunia usaha mendukung konsistensi, implementasi RPJPD dalam kurun waktu 2005-2025.

Keberhasilan implementasi RPJP Daerah yaitu terwujudnya visi jangka panjang Kabupaten Mukomuko, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomukoyang Tangguh, Berdaya Saing dan Sejahtera”** akan sangat tergantung pada konsistensi penjabaran lima tahunnya dalam RPJM Daerah serta penjabaran tiap tahun dalam RKP Daerah. Semua itu dapat terlaksana melalui komitmen, integritas dan dedikasi para pimpinan daerah, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS